



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 2

TAHUN : 1980

SERI : D NO. 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 1 Tahun 1979

T E N T A N G

PENETAPAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali, yang merupakan landasan bagi penyusunan Repelita Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomer : 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 2. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1978 Nomer : Bangda 1/9/26 tentang pedoman penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomer : 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mendengar** : Musyawarah Sidang Pleno DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 12, 16, 26 Pebruari 1979; 2, 9 Maret 1979.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali ;

Pasal 1.

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali, disusun sebagai berikut :

- (a). Bab I P e n d a h u l u a n .
- (b). Bab II Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
- (c). Bab III Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ketiga Daerah Bali.
- (d). Bab IV P e n u t u p .

Pasal 2.

Uraian materi seperti tersebut dalam pasal 1, terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali seperti terlampir.

Pasal 3.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali ini, dapat diatur dalam ketentuan-ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ini menjadi landasan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dalam penyusunan Repelita Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali itu sendiri.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : D E N P A S A R
Pada tanggal : 9 Maret 1979.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(PROF. DR. I. B. MANTRA).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
WAKIL KETUA ;

t.t.d.

(I KETUT WIDJANA S.H.).

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I.

Dengan surat keputusan

Tanggal : 14 Januari 1980 No. : Pem. 10/2/26 - 19.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 2 Tanggal : 4 Pebruari Tahun 1980.

Seri : D No. : 2

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

N A S K A H
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Pengertian.

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah suatu garis besar kebijaksanaan dan arah pembangunan Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.
2. Pola Umum Pembangunan Daerah tersebut merupakan rangkaian program-program Pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.
3. Rangkaian program-program Pembangunan Daerah yang terus menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan setahap demi setahap dan secara berencana apa yang dicantumkan dalam Tujuan Nasional seperti termaksud didalam Pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah untuk memberikan arah bagi pembangunan Daerah dalam ruang lingkup Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam UUD 1945.

C. Landasan Pembangunan Daerah.

1. Landasan Idil Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
3. Garis-Garis Besar Haluan Negara.
4. Kondisi Obyektif Daerah Bali.

D. Azas-Azas Pembangunan Daerah.

1. Azas manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan Warga Negara.
2. Azas usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa dan seluruh Rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
3. Azas Demokrasi, ialah berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang Politik, Sosial dan Ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

4. Azas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikannya kepada Bangsa dan Negara.
5. Azas perikehidupan dalam Keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan material dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupan darat, laut dan udara, serta antara kepentingan daerah dan nasional.
6. Azas Kesadaran Hukum, ialah bahwa tiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
7. Azas kepercayaan pada diri sendiri, yaitu bahwa Pembangunan Daerah harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta ber-sendikan kepada kepribadian bangsa.

E. Modal Dasar dan Faktor-Faktor Dominan.

Disusun sebagai berikut :

1. Modal Dasar.

Modal Dasar Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Rakyat dan Daerah Propinsi Bali ialah :

- a. Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia.
- b. Kedudukan Geografi Daerah Propinsi Bali terletak antara Jawa dan Nusa Tenggara sebagai wilayah penghubung dan sebagai salah satu pintu gerbang hubungan internasional, khususnya melalui jalur perhubungan udara dan karenanya Daerah Propinsi Bali mempunyai posisi cukup strategis.
- c. Sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat didarat dan dilautan memberikan kehidupan penduduk di Daerah Propinsi Bali disegala bidang.
- d. Jumlah penduduk yang cukup padat yang mempunyai sifat rajin, tekun, serta memiliki bakat dan ketrampilan khususnya dibidang seni budaya, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal Pembangunan utama bagi usaha Pengembangan disegala bidang.
- e. Modal rokhaniah dan Mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-citanya.
- f. Modal budaya, yakni budaya yang khas bersumber pada Agama Hindu yang berakar kuat dalam masyarakat.
- g. Potensi efektif Daerah yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dimiliki oleh Daerah, sepanjang sejarahnya, termasuk kekuatan sosial politik antara lain parpol dan golkar, organisasi profesi serta organisasi-organisasi tradisional, seperti Desa Adat, Subak dan organisasi sosial lainnya.

h) Stabilitas Daerah yang cukup mantap.

DOKUMENTASI
BIRO HUKUM

2. Faktor-Faktor Dominan.

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal Dasar Pembangunan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah dengan landasan serta azas-azas tersebut diatas perlu diperhatikan faktor-faktor dominan tersebut :

- a. Faktor demografi dan sosial budaya.
- b. Faktor geografi, hidrografi, geologie dan topografie.
- c. Faktor Klimatologie.
- d. Faktor flora dan fauna.
- e. Faktor kemungkinan pengembangannya.

F. Susunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu lima tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang (25 tahun), maka Pola Dasar Pembangunan Daerah perlu disusun dan dituangkan didalam Pola Umum Pembangunan Daerah secara sistimatis yang terdiri dari :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
2. Pola Umum Pelita Ketiga Daerah.

Pada dasarnya Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang berisi garis-garis besar kebijaksanaan dan arah pembangunan Daerah Jangka Panjang (25 tahun). Pola Umum Pelita Ketiga Daerah berisi garis-garis besar kebijaksanaan dan arah pembangunan Daerah Jangka Menengah (5 tahun). Pola Umum Pelita Ketiga Daerah disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang disesuaikan dengan batas kemampuan yang ada. Berdasarkan Pola Umum Pelita Ketiga Daerah itu selanjutnya disusun Repelita Daerah yang Ketiga.

B A B II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

A. P e n d a h u l u a n.

1. Berkat asung wara nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Pemerintah Daerah bersama-sama rakyat di Daerah Bali telah dapat melaksanakan Pembangunan Daerah melalui dua tahapan Pelita yakni Pelita I dan Pelita II sebagai realisasi perwujudan cita-cita Nasional di Daerah sebagai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yakni suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meskipun pelbagai keberhasilan dalam pembangunan telah dicapai, tidaklah perlu cepat-cepat merasa puas karena masih adanya masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah kecepatan pertumbuhan penduduk didaerah, keterbatasan potensi daerah dalam arti terbatasnya potensi sumber-sumber alam yang dapat dieksplorir bagi peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah dan kemungkinan adanya problematik dalam bidang sosial budaya sebagai akibat berkembangnya kepariwisataan dan tehnologi.
Ini berarti Daerah propinsi Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka panjang akan dihadapkan kepada masalah-masalah yang memerlukan penanganan secara berencana dan bertahap melalui serangkaian pembangunan.

3. Agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan benar-benar terarah dalam mencapai tujuan dan cita-cita daerah dan dalam rangka mencapai tujuan Nasional perlu disusun dan ditetapkan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan Pelaksanaan Pembangunan Pelita I dan Pelita II yang selanjutnya berkesinambungan melalui Repelita III Daerah, Repelita IV Daerah dan seterusnya yang saling sambung menyambung dalam satu kesatuan yang serasi.
4. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang tersebut merupakan garis-garis besar dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 25 - 30 tahun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada bagian-bagian berikutnya dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini dijabarkan kekhususan-kekhususan Daerah dengan mengemukakan ciri-ciri utama Daerah dan kaitannya dengan REPELITA Nasional, yang berturut-turut diuraikan pada bagian "Kondisi dan Potensi Wilayah", "Tujuan Pembangunan Daerah" dan "Arah Pembangunan Daerah".

B. Kondisi dan Potensi Wilayah.

1. K o n d i s i .

Kondisi Fisik.

a. Letak Astronomi :

Pulau Bali terletak diantara $7^{\circ}54'$ dan $8^{\circ}3'$ Lintang Selatan, $115^{\circ}26'$ dan $115^{\circ}43'$ Bujur Timur.

b. Letak Klimatologi dan Meteorologi :

Pulau Bali terletak di daerah equator (terletak antara $23,5^{\circ}LS$ dan $23,5^{\circ}LU$) dan termasuk daerah beriklim tropis. Curah hujan relatif tinggi yaitu 120 mm per bulan dengan musim penghujan berkisar pada bulan Oktober s/d April dan musim panas adalah sebaliknya.

c. Letak Maritim :

Pulau Bali dikelilingi oleh lautan yang luas. Disebelah Utara adalah laut Jawa, disebelah Selatan adalah lautan Indonesia, disebelah Barat adalah Selat Bali dan disebelah Timur adalah selat Lombok.

Keadaan ini sangat mempengaruhi iklim, kesuburan tanah dan kehidupan penduduk di Bali.

d. Letak Ekonomis :

Letak Pulau Bali adalah sangat strategis dan menguntungkan dilihat dari segi ekonominya, karena merupakan penghubung lalu lintas darat dan laut antara Pulau-Pulau di Nusa Tenggara dengan Jawa, dan juga merupakan daerah penghubung antara dua Benua Asia dan Australia.

Ini berarti perhubungan laut dan udara dari Bali ke Benua lainnya sangat lancar. Sebagai daerah Pariwisata maka letak Pulau Bali adalah sangat menguntungkan.

e. T o p o g r a f i :

Pulau Bali memiliki topografi yang spesifik yaitu 80 % bergunung dan berjurang dengan tanah yang umumnya berasal dari gunung berapi dan struktur yang rawan terhadap erosi. Di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur dengan puncak terendah 600 m dan tertinggi

3100 m yaitu Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Gunung Batur di Kabupaten Bangli, Gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan, Gunung Merbuk di Kabupaten Jembrana. Disebelah Utara dan Selatan pegunungan terbentang dataran, yang merupakan daerah landai dan menurun secara teratur. Karena letak pegunungan lebih ke Utara, maka datarannya disebelah Utara lebih sempit dari pada disebelah Selatan.

f. Hidrologi dan Orologi (sumber air, hutan, pengairan/sungai) :

Hutan sebagai sumber penyimpanan air dan sumber pengairan terletak ditengah-tengah Pulau Bali membentang didaerah pegunungan dari Barat ke Timur. Luas kawasan hutan menurut data tahun 1975 adalah seluas 124,999 Ha. (22, 19 % dari luas Pulau Bali) terbagi dalam beberapa jenis hutan sebagai berikut : Hutan produksi 29.092 Ha. Hutan lindung : — mutlak 60.000 Ha, dan tidak mutlak 35.907 Ha. Sungai-sungai yang bersumber dari hutan ini kebanyakan mengalir kedaerah Selatan dari pada ke Utara. Sungai ini merupakan sumber irigasi dan bermuara dilaut Indonesia dan Laut Jawa. Sungai disebelah Utara pada musim panas banyak yang mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan karena banyak areal hutannya yang perlu direboisasi.

g. Jenis dan Keadaan tanahnya :

1). Jenis tanah di Bali dapat dibedakan menjadi empat bagian :

a). Daerah batu gamping Barat :

Daerah ini meliputi ujung Barat Pulau Bali yang merupakan daerah kering (Gilimanuk, Buleleng Barat, tanah kapur batu ampar di Kecamatan Gerokgak.

b). Daerah endapan alluvial Selatan :

Daerah ini terdiri dari endapan-endapan sungai dan lapukan tanah vulkanik muda sehingga keadaannya sangat subur dan baik untuk pertanian. Daerah ini merupakan daratan yang luas yang membentang dari Daerah Badung sampai ke Gianyar.

c). Daerah batu gamping Selatan :

Daerah ini terletak didaerah bagian Selatan Pulau Bali yang meliputi Kuta, Pecatu dan Nusa Penida yang keadaannya sangat kering.

d). Daerah Vulkanik muda :

— Bagian sebelah Barat : Daerah ini meliputi daerah Tabanan sebelah Barat yaitu : disebelah Barat jalan Singaraja lewat Pupuan. Daerah Vulkanik Muda ini topografinya sangat berat, karena banyak berlembah dan berbukit, tapi cukup baik untuk pertanian dan sebagian masih berupa hutan.

— Bagian sebelah Timur : Daerah ini terletak disebelah Timur jalan Tabanan - Singaraja lewat Pupuan, yang keadaannya lebih rata dan lebih baik keadaan pertaniannya, karena lebih mudah mengatur pengairannya.

— Daerah Gunung Seraya : Daerah ini terletak di ujung Timur Pulau Bali yang keadaannya kering dan berbatu.

— Lembah Karangasem : Daerah ini terletak disebelah Barat daerah gunung Seraya dan merupakan depresi dengan Karangasem sebagai pusatnya. Karena itu ketika terjadi letusan Gunung Agung

1963, Daerah Karangasem tertimbun lahar yang tebal sehingga sampai saat ini tanah itu belum sepenuhnya dapat dipergunakan untuk tanah pertanian.

- Daerah Pantai Utara : terletak disepanjang pantai Utara, merupakan jalur alluvial yang sempit. Jalur ini termasuk daerah kering. Tetapi karena banyak adanya mata air terdapat antara Kubutambahan dan Kalisada, maka daerah ini dapat dipergunakan untuk pertanian.
- Daerah Bukit Sidemen : Daerah ini terdapat disebelah Barat Karangasem dan setelah terjadi letusan Gunung Agung 1963 telah tertutup lahar.

2). Keadaan tanah di Bali sebagai berikut :

- a). Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat bencana alam Gunung Agung, bencana alam gempa bumi dan bencana alam lainnya belum seluruhnya dapat direhabilitir.
- b). Tanah-tanah kritis dan daerah kritis yang terdapat antara lain di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, Kecamatan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, daerah Bukit di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, bagian barat Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, dan beberapa daerah di Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng memerlukan penanganan secara lebih intensif.

h. Proporsi penggunaan tanah :

Dilihat dari segi penggunaan tanah, maka Bali terbagi menjadi Daerah-daerah :

1. Hutan	124.999 Ha	(22,19%).
2. S a w a h	95.758,620 Ha.	(17,20%).
3. T e g a l a n	60.102.616 Ha.	(10,67%).
4. Kebun/Perkebunan	177.869,602 Ha.	(31,58%).
5. Perkampungan/Desa	55.940,489 Ha.	(9,93%).
6. Kota Kabupaten/Pusat Pertumbuhan	9.577,688 Ha.	(1,70%).
7. Jalan - jalan	2.196,439 Ha.	(0,39%).
8. Sungai - sungai	3.186,435 Ha.	(0,57%).
9. Danau/rawa/perikanan	3.323.387 Ha.	(0,59%).
10. Tanah yang kurang produktif	29.178,215 Ha.	(5,18%).

Berdasarkan penyebarannya dimasing-masing Daerah Tingkat II terlihat bahwa sebagian terbesar dari sawah dan perkebunan terdapat di Kabupaten Tabanan, tegalan di Kabupaten Klungkung, perkampungan dan perkotaan di Kabupaten Badung, hutan di Kabupaten Jembrana sedangkan tanah yang kurang produktif terdapat di Kabupaten Karangasem.

Berhubung dengan menyempitnya tanah pertanian karena meningkatnya keperluan ruang untuk pelbagai pembangunan merupakan masalah yang penting untuk mendapat pemecahan dan juga semakin menyempitnya pola pemilikan tanah dan adanya petani penggarap memerlukan pemecahan yang sungguh-sungguh.

i. Luas Pulau Bali :

Luas Pulau Bali dengan beberapa pulau kecil-kecil seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Ceningan dan Lembongan mempunyai luas : 5.632,86 Km².

Luas masing-masing Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut :

1. Buleleng	1.320,80 Km ² .
2. Jembrana	841,80 Km ² .
3. Tabanan	863,06 Km ² .
4. Badung	542,50 Km ² .
5. Gianyar	368,— Km ² .
6. Bangli	520,— Km ² .
7. Klungkung	315,— Km ² .
8. Karangasem	861,70 Km ² .
Jumlah :	5.632,86 Km ² .

DOKUMENTASI
BIRO HUKUM

Kondisi Sosial.

a. Penduduk.

Berdasarkan angka pada Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat I Bali, penduduk Pulau Bali adalah sebagai berikut :

- Tahun 1961 1.782.529 orang.
- Tahun 1971 2.120.338 orang.

Didalam perkembangan sampai dengan akhir tahun 1975 jumlah penduduk Pulau Bali menjadi 2.254.222 orang, dengan kepadatannya ± 410 orang/km². Apabila dilihat jumlah penduduk Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan hasil Sensus tahun 1971, dan hasil Her-registrasi jumlah penduduk th. 1976 (2.299.490 jiwa). dengan menggunakan rumus berganda didapatkan rata-rata prosentase kenaikannya 2,03 % setahun.

Dengan prosentase kenaikan yang demikian, yang walaupun sudah diimbangi dengan program Keluarga Berencana yang sudah cukup berhasil, namun pertambahan penduduk untuk tahun-tahun mendatang tidak dapat dielakkan. Pertambahan tersebut baik disebabkan oleh kelahiran sendiri, maupun akibat arus pergeseran penduduk dari daerah luar Pulau Bali.

Bertambahnya penduduk secara terus menerus dan dihadapan pada wadah potensi fisik yang relatif tetap, menyebabkan kepadatan yang makin meningkat. Penggunaan tanah akan tidak sesuai lagi dengan fungsinya hingga dapat mengganggu lingkungan itu sendiri, dan dapat menimbulkan berbagai masalah fisik, sosial, maupun ekonomi.

Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut akibat dari pertumbuhan penduduk, sesuai dengan kebijaksanaan terdahulu untuk masa-masa yang akan datang tetap ditempuh :

- Menggalakkan program transmigrasi dengan meningkatkan kwantitasnya maupun kualitasnya.
- Program Keluarga Berencana yang telah berhasil, tetap digalakkan, dimantapkan dan dibina terus.
- Dilakukan usaha penertiban penduduk sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nomor : 2/76 tanggal 12 Juli 1976.

b. Ekonomi.

Ditinjau dari segi Sosial Ekonomi dari Penduduk, sesuai dengan Sensus terakhir (1971) prosentasenya per sektor adalah sebagai berikut :

— Sektor Pertanian	± 66,70 %
— Sektor Perdagangan	± 10,62 %
— Sektor Jasa : Kemasyarakatan	± 8,20 %
— Sektor Industri	± 5,78 %

Prosentase sosial ekonomi yang demikian tercermin dari pengelompokan penduduk yang sebagian besar berada dipedesaan (daerah agraris) yaitu sebesar 90,19 %, dan lainnya yaitu : 9,81 % berada diperkotaan.

Jadi secara dominan struktur sosial ekonomi penduduk berada di sektor agraris. Dengan memperhatikan batas minimal pemilikan tanah bagi para petani 2 ha, baik tanah basah maupun kering sesuai dengan Perpu No. 56 tahun 1960 ini sudah mendekati. Sedangkan didalam kenyataannya malahan sebagian besar para keluarga petani memiliki tanah dibawah ketentuan 2 ha, akibatnya sudah tentunya produktivitasnya relatif kecil.

Sesuai dengan permasalahan yang dimiliki maka perlu dikembangkan sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, industri, jasa, serta penggalakan program kependudukan melalui usaha Transmigrasi, KB, maupun penertibannya.

c. Sosial.

1). Agama.

Sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan unsur kehidupan yang mutlak bagi rakyat kita. Karena itu, hidup keagamaan tersebut hingga kini dan seterusnya perlu dibina sebaik-baiknya, sejalan dengan pembinaan sektor-sektor kehidupan lainnya dalam pembangunan ini. Sebagai kenyataan penduduk Bali yang beragama Hindu sampai saat ini adalah sebanyak 96 % dari jumlah penduduk Pulau Bali, sedangkan selebihnya terdiri dari pemeluk Agama Islam sebesar 2,5 %; Umat Kristen Katholik sebanyak 0,6 % ; Umat Kristen Protestan sebanyak 0,5 %; sedangkan jumlah pemeluk agama Budha dan Kong Hu Cu masing-masing sebanyak 0,2 %. Antar umat beragama telah berlangsung suasana kehidupan yang penuh kerukunan dan terus dibina serta dimantapkan.

2). Pendidikan.

Bahwa pendidikan mempunyai peranan untuk menunjang segala gerak pembangunan Daerah Bali secara luas dalam berbagai sektor. Dengan demikian kebijaksanaan dibidang pendidikan dengan segala potensi yang ada hendaknya mampu menciptakan kader-kader tenaga pembangunan yang terampil menguasai pengetahuan serta tehnologi yang berlandaskan pandangan hidup Pancasila. Bahwa sesuai dengan tujuan yang telah digariskan dalam pendidikan maka segenap potensi yang ada perlu dikembangkan dan ditingkatkan terus sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai kenyataan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sampai saat ini jumlah sekolah-sekolah dari berbagai jenis adalah sebagai berikut :

- a). Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta (termasuk MII) sebanyak 1.626 buah.

- b). SLTP Negeri 53 buah dan Swasta/Subsidi/Berbantuan 128 buah.
- c). SLTA berjumlah 32 buah dan Swasta/Subsidi/Berbantuan 41 buah.
- d). Universitas/Institut/Akademi Negeri 1 buah dan Swasta 8 buah.

Dengan adanya sarana/prasarana pendidikan seperti tersebut diatas dan ditambah dengan biaya pendidikan seringnya mungkin diharapkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua usia sekolah, sehingga masalah putus sekolah (drop outs) dapat dicegah sejauh mungkin.

3). Kebudayaan .

Segala aktifitas dibidang ritual-keagamaan beserta adat-istiadatnya yang bersifat tradisional positif sampai saat ini masih dipertahankan dan dipelihara dengan baik diharapkan menjadi sumber penggerak keagairahan pembangunan di Daerah Bali.

Untuk itu nampak adanya kemajuan dalam program Pemerintah antara lain dengan pendirian Pusat Kesenian atau Art Centre dan pembinaan seni budaya, pembinaan lembaga-lembaga tradisional dan lain-lainnya. Selain itu Pemerintah dalam kebijaksanaan antara lain menetapkan daerah Bali sebagai Daerah Pariwisata Budaya.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan selanjutnya pemerintah akan mengambil langkah-langkah konkrit dengan menempuh suatu pola program yang terpadu dengan program-program yang ada di sektor lainnya yang dapat menumbuhkan kreatifitas seni-budaya Bali dalam memperkaya perbendaharaan seni-budaya bangsa secara keseluruhan. Dimasa-masa yang akan datang pembinaan dan pengembangan kebudayaan di daerah Bali diharapkan akan merupakan kegiatan yang terus ditingkatkan dan penggarapannya dilakukan secara terkoordinasikan.

4). Kesehatan .

Pengaruh perkembangan tehnologi, pembangunan, ekonomi dan politik serta perkembangan lalu lintas pariwisata kesemuanya akan saling berkaitan mempengaruhi situasi masyarakat didalam sikap hidup, norma dan kaidahnya.

Gangguan-gangguan, dan tekanan-tekanan kondisi sosial budaya dimasyarakat akan merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan peningkatan penyakit seperti antara lain : serebro/kardio vaskuler, cedera kecelakaan lalu lintas, gangguan keseimbangan jiwa.

Status kesehatan masyarakat di Bali tergantung pada beberapa kondisi yang tercermin dalam beberapa permasalahan yakni :

- a). Permasalahan lingkungan fisik biologis misalnya antara lain : penyediaan air minum sehat/bersih, sanitasi.
- b). Masalah lingkungan sosial dan budaya, pengertian dan peran serta masyarakat.
- c). Masalah gangguan status kesehatan masyarakat akibat penyakit-penyakit menular maupun tidak menular.
- d). Masalah pelayanan Kesehatan yang meliputi antara lain : jumlah sarana, penyebaran sarana dan tenaga para medis.

- e). Masalah pengadaan, pengembangan tenaga kesehatan yang meliputi perencanaan, pendidikan dan penggunaannya.

Adapun status dan kondisi kesehatan yang demikian itu sudah ditunjang oleh prasarana/sarana, serta tenaga para medisnya, yang walaupun belum memadai, namun secara bertahap perlu disempurnakan, guna mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya bagi kesehatan masyarakat.

5). Keluarga Berencana.

Sejak pelaksanaan Repelita I usaha yang menyangkut Keluarga Berencana di Bali dilancarkan berdasarkan pola 3 dimensi, yaitu perluasan jangkauan, pembinaan serta pelembagaan/pembudayaan.

Dimensi pertama, perluasan jangkauan dapat dilalui secara baik selama Pelita I, sedangkan dimensi kedua, pembinaan diselenggarakan selama Pelita II. Dalam waktu tiga tahun terakhir Pelita II, telah dapat sekaligus ditanamkan dasar-dasar mengenai pelembagaan, untuk kemudian hari dapat lebih lancar memasuki fase pembudayaan ditengah-tengah masyarakat. Apabila kondisi dapat tetap dipertahankan seperti itu, maka pola norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, akan dapat dicapai sebelum memasuki tahun 2000. Oleh karena itu usaha dalam bidang Keluarga Berencana sudah perlu dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti misalnya pendidikan kependudukan, usaha terpadu Keluarga Berencana, dan gizi, peningkatan peranan kaum wanita dan sebagainya.

Semua usaha terpadu diatas ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita, yaitu dengan ciri penurunan tingkat fertilitas yang bermakna, dibandingkan dengan situasi pada tahun 1970-an.

Dari hasil survey penduduk antar sensus dilaksanakan tahun 1976 terlihat jelas penurunan tingkat fertilitas di Propinsi Bali sebesar 35% suatu tingkat penurunan yang sangat menonjol dibandingkan dengan lain-lain Propinsi di Jawa dan Bali.

Hal ini dimungkinkan didaerah ini, mengingat bahwa masyarakat pedesaan yang merupakan masyarakat terbesar, telah dapat dijangkau secara merata dengan pelayanan Keluarga Berencana, yang didasari oleh kesadaran masyarakat yang tinggi, terbukti bahwa pada akhir tahun 1978 sejumlah 69 % dari pasangan usia subur, telah menjadi peserta Keluarga Berencana yang lestari.

6). Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan sosial adalah merupakan problema yang senantiasa ada dan mengikuti manusia selama hayatnya.

Titik tumpu persoalan ini terletak pada persoalan bagaimana dapat diarahkan serta dibangunnya manusia seutuhnya baik dalam kehidupan manusia itu pribadi maupun dalam lingkungan masyarakat.

Keutuhan tersebut dirangkaikan dengan pengembalian bagi mereka yang berada dalam status abnormal baik fisik maupun psychis yang disebabkan adanya bencana alam, ketuaan usia (jompo), yatim piatu, tuna (wisma, karya, susila), penderita cacat (fisik maupun psychis), akibat pengaruh

kenakalan dan bahaya narkotika, dimana seluruhnya memerlukan langkah dan program penanggulangan.

Melalui program penanggulangan diharapkan nantinya dapat membawa serta membentuk kepribadian sekaligus memfungsikan mereka sebagai insan-insan yang normal dan sanggup berpartisipasi/melaksanakan pembangunan bagi dirinya sendiri maupun bagi kehidupan masyarakat serta lingkungannya.

d. Politik.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan banyak ditentukan oleh faktor sosial politik disamping faktor-faktor lainnya. Dalam bidang politik kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mantap, perlu dipupuk dan dipelihara demi kelancaran usaha mencapai arah dan sasaran pembangunan Daerah dalam rangka tujuan nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut termasuk didalamnya usaha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk tetap dapat menciptakan suatu sistim politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.

Kehidupan yang demikian akan dapat memperkuat sistim konstitusional, mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, dalam rangka mempercepat proses tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

e. Keamanan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah merupakan situasi dan kondisi masyarakat yang mutlak harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan kewibawaan Pemerintah dan ketertiban masyarakat dalam hubungannya dengan ketahanan nasional berdasarkan Ideologi Pancasila.

Adalah merupakan kewajiban kita sebagai pendukung, pengembangan dan pelaksanaan dari fungsi keadaan dan ketertiban, yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada petugas-petugas keamanan seperti unsur-unsur Polri khususnya maupun ABRI, serta petugas-petugas lainnya.

Disamping itu partisipasi rakyat sangat besar artinya. Mengenai stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Daerah Tingkat I Bali yang relatif mantaf, kiranya tetap dipelihara sehingga masyarakat merasa aman, tentram serta gairah di dalam mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam usaha-usaha pembangunan.

2. Potensi.

Potensi-potensi di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, bila ditinjau dari kenyataan obyektif dapat diuraikan dalam beberapa sektor yang satu dengan yang lain sangat berkait sebagai berikut :

- a. Sektor Dasar : Bidang Sosial Budaya.
- b. Sektor Utama : Bidang Ekonomi Produksi.
- c. Sektor Penunjang : Bidang Prasarana/Sarana.

a. Sektor Dasar Bidang Sosial Budaya.

Sektor Dasar menyangkut beberapa aspek kehidupan sosial dan budaya yang meliputi kegiatan-kegiatan disektor :

- 1). Agama dan Kepercayaan.

2). Pendidikan dan Kebudayaan.

3). Kesehatan.

1). Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- a). Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun diantara sesama Umat Beragama, diantara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
- b). Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamankan baik didalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan.
- c). Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan Agama yang dimasukkan kedalam kurikulum di Sekolah-Sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri.

2). Pendidikan dan Kebudayaan.

a). Pendidikan.

Masalah pendidikan adalah masalah yang menyangkut kemajuan dan masa depan Daerah Bali. Oleh karena itu bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keselamatan dan kebahagiaan generasi yang akan datang sebagai penerus kehidupan bangsa. Berkaitan dengan pembangunan maka pembinaan terhadap pendidikan haruslah dilakukan secara terus menerus untuk berhasilnya pembangunan.

Untuk keperluan itu maka diperlukan tenaga pembangunan yang menunjang kebutuhan dalam gerak pembangunan itu sendiri baik kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan di daerah diperlukan suatu pola program yang bersifat menyeluruh. Dalam rangka pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar akan dilaksanakan usaha-usaha yang konkrit baik melalui sistim pendidikan formal maupun informal, terutama untuk mengatasi masalah pemuda putus sekolah (drop outs).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Pemerintah akan memberikan perhatian dan penangan yang lebih serius dibidang pendidikan antara lain melalui penyempurnaan fasilitas-fasilitas pendidikan maupun melalui penyempurnaan sistim pendidikan yang ada.

b). Kebudayaan.

Bahwa pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Daerah tidak dapat dilepaskan dari pada pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional secara keseluruhan.

Bahwa unsur kehidupan adat-istiadat beserta nilai-nilai falsafah keagamaan yang berlandaskan falsafah Agama Hindu sampai saat ini masih

tetap menjadi sumber yang menentukan corak kebudayaan masyarakat Bali pada umumnya. Berhubung dengan itu maka dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan di daerah agar diselaraskan dengan ciri-ciri khas tersebut diatas didalam rangka mengembangkan dan menumbuhkan keaneka-ragaman kebudayaan nasional sehingga dengan demikian akan mencerminkan keluhuran kebudayaan bangsa yang berlandaskan falsafah Pancasila.

Dengan timbulnya kebudayaan daerah yang berkepribadian dan berkesadaran maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang dilain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif, yang menunjang kebutuhan pembangunan.

3). Kesehatan .

Serasi dengan pertumbuhan pada setiap pembangunan, dibidang Kesehatanpun dilakukan usaha-usaha penyediaan pelayanan Kesehatan yang lebih meluas dan merata bagi seluruh rakyat dengan penyempumaan-penyempumaan antara lain merehabilitir RSUD-RSU, Puskesmas-Puskesmas, alat-alat medis, obat-obatan, penyediaan tenaga para medis serta sarana pembiayaan operasional yang memadai.

Disamping itu usaha-usaha preventif dibidang Kesehatan tetap digalakkan, melalui penyehatan lingkungan, penyediaan air minum bersih baik bagi penduduk pedesaan maupun perkotaan, perbaikan gizi, pemanfaatan obat-obatan tradisional serta meningkatkan status Kesehatan masyarakat lewat usaha-usaha Pembangunan Masyarakat Desa (PKMD).

b. Sektor Utama.

Bidang Ekonomi Produksi.

Dalam bidang ekonomi produksi terdapat dua kegiatan pokok :

- 1). Pertanian dalam arti luas.
- 2). Kepariwisataan yang bermodal dasar kebudayaan Bali yang bersumber pada agama Hindu.

1). Pertanian dalam arti luas.

Daerah Bali sampai saat ini masih merupakan daerah dengan struktur ekonomi yang agraris, dimana potensi agraris yang ada relatif terbatas. Pola kegiatan produktif memberikan gambaran yang cukup banyak ragamnya. Disamping produksi pangan sebagai kegiatan pokok terdapat kepariwisataan sebagai sumber daerah yang terkenal.

Sedangkan produksi perkebunan rakyat(kopi, kopra, dan lain-lain), peternakan, perikanan, juga menempati kedudukan yang penting dalam pola kegiatan Regional Bali sekarang.

Berikut ini diajukan berbagai aspek dari pada kegiatan tersebut diatas dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangannya dimasa depan pada umumnya. Kenyataan utama tersebut antara lain :

a). Pertanian Pangan.

Produksi Pangan merupakan faktor usaha yang tradisional. Management tradisional dari pada pertanian dalam kombinasi dengan kesuburan tanah secara potensial dapat menjamin pemenuhan kebutuhan

akan pangan bagi penduduk daerah yang cukup besar kepadatannya. Untuk meningkatkan hasil produksi pangan (padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan lain-lain) di daerah tersedia kemungkinan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi.

b). **P e r k e b u n a n .**

Merupakan usaha yang berkembang dan dikembangkan dengan hasilnya yang punya arti penting bagi rakyat maupun Daerah. Sesuai dengan kegiatan pokok yang telah diuraikan diatas maka peningkatan hasil dengan ekstensifikasi akan lebih banyak menghadapi persoalan khusus yang harus diselesaikan daripada intensifikasi dan diversifikasi. Hal itu masih perlu diselidiki lebih lanjut dalam kaitannya dengan kebijaksanaan yang integral. Berhasilnya peningkatan produksi dan pendapatan dibidang pertanian dalam arti luas akan sangat besar perannya terhadap perkembangan industri serta perdagangan lokal, antar pulau maupun perdagangan luar negeri (export).

c). **P e t e r n a k a n R a k y a t .**

Sistim peternakan adalah sistim peternakan rakyat dan umumnya menghasilkan ternak konsumsi dan ekspor berupa sapi, babi yang juga merupakan bahan ekspor utama Daerah Bali disamping komoditi lainnya. Mengingat bahwa sebagian daripada hasil yang diekspor keluar Daerah maka khususnya bagi sektor kegiatan ini masih terdapat alternatif-alternatif peningkatan hasil dan pengolahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi (processing).

d). **P e r i k a n a n .**

Daerah Bali mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi sumber produksi perikanan yang bermanfaat didalam menanggulangi masalah kekurangan protein hewani dikalangan penduduk Bali.

Hal ini terlihat jelas dari adanya berjenis-jenis ikan tawar, laut dan payau. Peningkatan hasil baik dengan cara ekstensifikasi masih sangat memungkinkan dalam tujuan pemenuhan kebutuhan penduduk Daerah Bali dan untuk ekspor.

e). **K e h u t a n a n .**

Berhubung luas pulau Bali 5.632,86 Km² maka jumlah hasil keseluruhan yang dapat diperoleh dari hutannya tidaklah cukup besar, untuk dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan baru yang pokok. Pada waktu ini luas hutan \pm 22,19 % dari luas daratan dan belum sesuai luas yang disyaratkan untuk pertimbangan hydrologi yang baik. Mungkin masih dapat diadakan penstrukturan kembali sesuai dengan kebijaksanaan disamping usaha-usaha reboisasi dan penghijauan, lebih-lebih dalam rangka pelaksanaan Program "Bali Menuju Pulau Taman" (Bali yang indah dan lestari).

2). **K e p a r i w i s a t a a n .**

Kepariwisata di Daerah Bali adalah usaha-usaha yang dirintis sejak sebelum perang. Dapat diperkirakan bahwa ada perbedaan pengaruh kepariwi-

sataan tersebut didaerah pedusunan dan didaerah perkotaan. Pola pengaruh tersebut belum merata diseluruh di Bali, demikian juga diantara masing-masing kehidupan baik didaerah pedusunan maupun didaerah perkotaan.

Didaerah pedusunan yang terkena pengaruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan terbatas pada kerajinan tangan, pertanian dan pariwisata sebagai usaha komplementer, sedangkan dikota/tempat tertentu, impact itu adalah dalam bentuk pelayanan (akomodasi, transport dan jasa-jasa lain) dengan kemungkinan bahwa masih ada hasilnya ditransport keluar Daerah.

Untuk itu peningkatan usaha kepariwisataan dipertimbangkan atas dua kemungkinan :

— Intensifikasi.

Pembangunan-pembangunan prasarana yang sekarang sedang berlangsung di Daerah Sanur, Kuta, Nusa Dua dan bagian daerah tertentu lainnya dapat digolongkan kedalam usaha intensifikasi. Demikian pula peningkatan jalan, Denpasar - Gilimanuk yang akan memberikan sumbangan yang berarti didalam mengintensifikasikan kegunaan prasarana yang sudah ada dalam menunjang kelancaran lalu lintas perekonomian. Pembangunan prasarana, sarana, obyek-obyek kepariwisataan perlu ditingkatkan dan dipertegas secara spesifik dan secara lebih merata diseluruh Bali. Intensifikasi dalam usaha pendukung kepariwisataan, antara lain barang kerajinan, produksi pertanian, perikanan, peternakan, industri, usaha jasa, dan lain-lain perlu mendapat perhatian lebih meningkat.

Dalam pengembangan usaha-usaha tersebut, perlu nasib pengerajin, petani, golongan ekonomi lemah, dan lain-lain usaha kecil dihimpun dalam satu wadah, antara lain dalam usaha kooperasi.

— Ekstensifikasi.

Agaknya peningkatan hasil dibidang kepariwisataan untuk masa waktu yang dekat ini akan lebih menguntungkan pada kegiatan-kegiatan intensifikasi dari pada penanaman modal di obyek-obyek pariwisata yang baru. Lebih lanjut kiranya apabila peningkatan konsentrasi-konsentrasi pada pusat lama berhasil, barulah diadakan perluasan-perluasan yang dalam hal itu hendaknya dilaksanakan sinkron dengan kebutuhan-kebutuhan usaha-usaha pembangunan disektor yang lain. Usaha pengembangan kepariwisataan jelas membawa efek ganda dalam sektor pembangunan antara lain pertanian dan khususnya usaha kerajinan rakyat dan usaha-usaha jasa lainnya.

Usaha industri dan kerajinan rakyat dan usaha jasa diwaktu-waktu yang akan datang atas dasar kondisi obyektif Daerah Bali, mutlak perlu dikembangkan secara lebih cepat dengan tetap membina suasana kekhususan Daerah Bali itu sendiri.

Disamping dua kegiatan utama diatas, belum ada penyelidikan geologis yang intensip dilakukan untuk mengetahui mineral-mineral dalam konsentrasi-konsentrasi yang penting untuk dijadikan landasan bagi pola kegiatan-kegiatan perindustrian yang besar, kecuali konsentrasi kapur yang

dewasa ini sedang dipertimbangkan kegunaannya untuk material pembangunan.

Penyelidikan-penyelidikan lanjutan masih perlu dilakukan untuk mengetahui apakah berbagai pola struktur geologis yang khusus masih memungkinkan penemuan-penemuan sumber mineral lain.

Penelitian geothermal yang pernah dilakukan di Danau Beratan, untuk mendapatkan tenaga panas bumi, hasil sementara memberi petunjuk terdapatnya tenaga panas bumi yang berpotensi cukup besar. Penelitian ini perlu dilanjutkan dalam rangka percepatan perkembangan pembangunan diwaktu-waktu yang akan datang.

c. Sektor Penunjang.

Bidang Prasarana/Sarana.

Secara kwalitatif sesuai dengan kenyataan obyektif dewasa ini, daerah Bali memiliki potensi yang cukup menonjol dibidang pertanian, pariwisata dan kebudayaan. Sampai kapan potensi tersebut dapat dipertahankan sangat tergantung dari pada pembangunan dan penyediaan sarana/prasana yang diarahkan untuk dapat menunjang peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam kaitan dengan penunangan sektor dasar dan sektor utama, maka sektor penunjang bidang prasarana/sarana yang keadaannya walaupun sudah semakin meningkat, tetapi masih perlu dilakukan peningkatan untuk selanjutnya, antara lain :

1). Pengairan.

Prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pertanian pangan adalah penyediaan air irigasi secara berencana dan teratur dengan diikuti usaha-usaha menjaga kelestarian sumber-sumber pengairan.

2). Perlistrikan.

Pembangunan perlistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kota serta merangsang kegiatan ekonomi.

3). Perhubungan.

Pembangunan prasarana angkutan (darat, laut, ferry, udara) dan perhubungan lainnya ditujukan untuk memperlancar arus barang/jasa dan manusia, keseluruhan daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil, sehingga bisa menunjang sasaran pembangunan dan tersedia pelayanan angkutan yang lebih baik, murah, teratur serta lancar. Sedangkan pembangunan jalan mengutamakan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada. Pembangunan jalan baru, dilakukan apabila dapat meningkatkan serta pemerataan pembangunan daerah/wilayah terutama jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasarannya.

4). Pos dan Telekomunikasi.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya.

5). Meteorologi.

Pembangunan prasarana meteorologi ditujukan untuk menunjang keselamatan pelayaran dan penerbangan serta untuk kepentingan pertanian.

6). Air Minum.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan dan kota, diperlukan adanya penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.

C. Tujuan Pembangunan Daerah.

Tujuan Pembangunan Daerah berlandaskan pada GBHN, Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan yang pada hakekatnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Sesuai dengan kedudukannya yang harus bersifat menunjang dan dalam ruang lingkup kerangka Pola Umum Pembangunan Nasional, maka tujuan utama Pembangunan Daerah tidak bisa lain dari tujuan Pembangunan Nasional yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Tujuan tersebut selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk sasaran pokok pembangunan daerah secara merata sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Peningkatan penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.
4. Perluasan kesempatan berusaha dan pengembangan usaha-usaha Nasional yang masih lemah, termasuk koperasi serta usaha-usaha rakyat kecil lainnya antara lain dibidang perdagangan, industri, kerajinan rakyat.
5. Pembinaan kebudayaan yang bersumber pada Agama Hindu dan yang merupakan modal dasar untuk pengembangan kepariwisataan di Daerah Bali.

D. Arah Pembangunan Daerah.

1. Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Manusia seutuhnya dan Pembangunan bagi seluruh Masyarakat di Daerah Bali dalam rangka pembangunan Nasional/Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya.
2. Pembangunan Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap. Adapun tujuan setiap tahap Pembangunan, untuk meningkatkan taraf hidup dengan kesejahteraan seluruh rakyat di Daerah Bali serta meletakkan landasan yang kuat untuk Pembangunan tahap berikutnya.
3. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok seperti diuraikan pada paragraf "Tujuan Pembangunan Daerah" ditempuh kebijaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Kebijaksanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan berlandaskan TRILOGI PEMBANGUNAN dimana untuk periode selanjutnya diberikan tekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan disamping pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang sehat dan dinamis.
4. Selanjutnya untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran melelaui kebijaksanaan Pembangunan tersebut, maka telah dan akan ditempuh strategi Pembangunan Daerah yang secara makro ditekankan kepada proses perubahan

struktural perekonomian Daerah menuju struktur perekonomian yang seimbang dan secara sektoral titik berat pembangunan Daerah Bali diletakkan pada sektor Pertanian dan sektor Pariwisata, sedangkan secara Regional diusahakan menciptakan pertumbuhan yang seimbang dan harmonis antara Wilayah-Wilayah Pembangunan beserta Pusat-Pusat Pertumbuhannya dan antara Pusat-Pusat Pertumbuhan dengan Daerah belakangnya (Urban-rural-balanced development).

5. Dalam rangka strategi pengembangan regional tersebut Daerah Bali dibagi atas 5 Wilayah Pembangunan yaitu :
- a. Wilayah Pembangunan Bali Timur yang meliputi Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli dengan Pusat Pertumbuhannya Amlapura dengan dominasi aktivitas :
 - Pertanian Pangan dan Peternakan.
 - Proteksi lingkungan untuk menciptakan Daerah Kebudayaan yang memiliki daya tarik Kepariwisata.
 - b. Wilayah Pembangunan Bali Tengah, yang meliputi Kabupaten Tabanan, Badung dan Gianyar dengan Pusat Pertumbuhannya Denpasar dengan dominasi aktivitas :
 - Pertanian pangan
 - Kepariwisata
 - Industri Kerajinan dan Processing bahan makanan
 - P e r d a g a n g a n
 - Proteksi Lingkungan.
 - c. Wilayah Pembangunan Bali Barat, yang terdiri dari Kabupaten Jembrana dengan Pusat Pertumbuhannya Negara, dengan dominasi aktivitas :
 - Pertanian pangan
 - P e r k e b u n a n
 - P e r i k a n a n
 - Industri sedang (pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan hasil lainnya).
 - d. Wilayah Pembangunan Bali Utara, yang terdiri dari Kabupaten Buleleng dengan Pusat Pertumbuhannya Singaraja, dengan dominasi aktivitas :
 - Pertanian Pangan
 - P e r k e b u n a n
 - P e t e r n a k a n
 - Industri sedang (pengolahan hasil pertanian dan hasil lainnya).
 - P e r d a g a n g a n
 - e. Wilayah Pembangunan Khusus Kabupaten Klungkung yang terdiri dari Kabupaten Klungkung inclusive daerah Kritis Nusa Penida dengan pusat pertumbuhannya Klungkung dengan dominasi aktivitas :
 - Pertanian pangan
 - Industri - Kerajinan rakyat
 - Kepariwisata
 - P e r d a g a n g a n

6. Dalam rangka usaha pemerataan pembangunan diseluruh Bali sejalan dengan strategi pengembangan regional dilanjutkan dengan penyusunan sub sub Wilayah pembangunan antara lain : Sub Wilayah Pembangunan Daerah Kritis, sub Wilayah Pembangunan centra-centra produksi dan Wilayah-Wilayah pembangunan wisata dan lain-lainnya untuk mewujudkan keseimbangan antara sektor perkotaan dan sektor pedesaan (URBD).
7. Dengan landasan kebijaksanaan dan strategi pembangunan seperti diuraikan diatas, maka disusunlah program-program dan proyek-proyek daerah yang pada hakekatnya berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi terutama melalui sektor pertanian dan sektor pariwisata dengan kemajuan Religius Sosial Budaya.
- ✓ Dalam hubungan ini program penyelamatan sumber-sumber kebudayaan antara lain akan dimanifestasikan dalam bentuk proyek penyelenggaraan Pesta Seni dan pengembangan kebudayaan (Pesta Seni diselenggarakan setiap tahun).
8. Melalui kegiatan Pesta Seni dan pengembangan Kebudayaan tersebut diharapkan akan dapat dirangsang kreasi-kreasi baru dalam seni dan kebudayaan sehingga melalui wilayah-wilayah yang potensial dalam bidang tersebut dapat dibangkitkan kesadaran untuk mewarisinya dan dikembangkan kecerdasan untuk meningkatkan mutu nilai-nilai budaya yang diwarisi tersebut.
9. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai bidang dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang adalah sebagai berikut :

a. Bidang Ekonomi :

Struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dengan prinsip bahwa Repelita yang terdahulu mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan Rakyat banyak serta untuk menciptakan landasan bagi Repelita berikutnya, maka struktur ekonomi yang seimbang itu akan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan Repelita-Repelita sebagai berikut :

- 1). Repelita Pertama : titik berat diletakkan pada sektor pertanian dan sektor Pariwisata dan Industri yang mendukung sektor pertanian dan sektor pariwisata.
- 2). Repelita Kedua : titik berat diletakkan pada sektor pertanian dan sektor pariwisata dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan kegiatan-kegiatan yang merupakan komponen dari industri kepariwisataan.
- 3). Repelita Ketiga : titik berat diletakkan pada sektor pertanian dan sektor pariwisata menuju swasembada pangan baik untuk masyarakat daerah Bali maupun untuk kebutuhan pariwisata dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata serta peningkatan usaha industri/kerajinan dan usaha-usaha jasa lainnya.
- 4). Repelita Keempat : titik berat diletakkan pada sektor pertanian dan sektor pariwisata untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan baik untuk kebutuhan masyarakat Bali maupun untuk kebutuhan pariwisata dan dengan meningkatkan industri yang berkaitan dengan pengemba-

ngan sektor pariwisata, usaha-usaha mana akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya. Dengan meningkatkan bidang ekonomi melalui sektor pertanian dan sektor pariwisata secara bertahap seperti diuraikan diatas, akan terpenulihlah kebutuhan pokok rakyat dan akan tercapailah struktur ekonomi yang lebih berimbang, ialah struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri khususnya industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat, setelah dilampaui Pelita yang Kelima atau yang Keenam untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebagai sub system dari Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

- b. Bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya. Atas dasar kepercayaan masyarakat Daerah Bali sebagai bagian dari Bangsa Indonesia terhadap Ida Sanghyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa maka kehidupan manusia dan masyarakat Daerah Bali harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemandirian keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan bathiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan Bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah dalam rangka tujuan Nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang. Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia di Daerah Bali harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesulilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan Kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari manusia budaya Indonesia di Daerah Bali sebagai pendukungnya.

- c. Bidang Politik dan Pemerintahan.

Dalam bidang politik di Daerah dimantapkan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap Warga Negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai pembangunan daerah dalam rangka tujuan Nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran itu termasuk didalamnya usaha-usaha untuk menciptakan, menkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan, kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistim politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

- d. Bidang Pertahanan Keamanan.

Sesuai Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional, maka diciptakanlah sistim Pertahanan Semesta yang mampu mensukseskan dan mengamankan perjuangan Nasional pada umumnya, Pembangunan Daerah sebagai sub sistim Pembangunan Nasional pada khususnya dari setiap ancaman yang datang dari luar negeri serta dari dalam negeri, sehingga usaha Bangsa dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah dalam rangka tujuan Nasional benar-benar aman dan tertib.

c. Catatan Dasar.

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang merupakan landasan bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pelita III Daerah yang selanjutnya merupakan dasar bagi penyusunan Repelita III Daerah.

B A B III

POLA UMUM PELITA KETIGA DAERAH PROPINSI BALI

A. P e n d a h u l u a n .

1. Dengan hasil-hasil positif yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik dalam Pelita Pertama maupun Pelita Kedua maka terciptalah keadaan yang semakin mantap untuk mulai dengan Pelita Ketiga sebagai pelaksanaan tahap Ketiga dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
2. Dalam Pelita Ketiga ini, sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita Kedua, akan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih meningkat kepada permasalahan kesejahteraan dengan berlandaskan pada Trilogi pembangunan yaitu : pemerataan, laju pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas Daerah yang sehat dan dinamis, dengan melaksanakan 8 jalur pemerataan pembangunannya.
Demikian pula halnya dengan berbagai bidang lainnya atau masalah lain dalam Pelita Kedua belum dapat sepenuhnya dipecahkan seperti peningkatan laju pembangunan ekonomi di Daerah-Daerah tertentu di Bali, peningkatan kemampuan yang lebih cepat bagi golongan ekonomi lemah, pengembangan koperasi, perhatian yang lebih besar kepada golongan-golongan miskin, daerah-daerah kritis, dan lain-lainnya.
3. Dalam pelaksanaan Pelita Ketiga Daerah dilanjutkan kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan ialah :
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
 - c. Stabilitas Daerah dan Nasional yang sehat dan dinamis.
4. Pelita Ketiga meliputi jangka waktu 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984.

B. T u j u a n .

Sebagaimana halnya dengan setiap tahap pembangunan dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Ketiga Daerah adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Taraf hidup rakyat diusahakan peningkatannya melalui peningkatan pendapatan dalam semua golongan masyarakat. Usaha-usaha untuk menaikkan pendapatan dan meratakan pendapatan seperti dimaksud dalam Trilogi Pembangunan harus tercermin

dalam kebijaksanaan pembangunan baik dilihat dari aspek Sektoral, aspek makro maupun dari aspek regional.

Secara Sektoral titik berat pembangunan Daerah dilihat pada Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata sesuai dengan kekhususan dan potensi yang dimiliki oleh Daerah Bali. Usaha peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, mendapat prioritas dalam pembangunan di Sektor Pertanian.

Peningkatan produksi barang dan jasa di sektor-sektor lainnya disamping secara langsung diusahakan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan akan sandang, perumahan, penyediaan sarana/prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan, juga ditujukan untuk peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, perluasan kesempatan berusaha dan pengembangan usaha2 Nasional di Daerah yang masih lemah, termasuk koperasi serta usaha2 rakyat kecil lainnya seperti dibidang perdagangan, industri-kerajinan rakyat daerah kritis dan sebagainya. Pembinaan Kebudayaan yang bersumber pada agama Hindu dan yang merupakan modal dasar untuk pengembangan kepariwisataan di Daerah Bali ditujukan untuk sedapat mungkin menciptakan keserasian antara kemajuan dibidang ekonomi dengan kemajuan religius sosial budaya.

Secara macro pembangunan Daerah sebagai Sub-system dari pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai laju pertumbuhan yang cukup tinggi dengan struktur perekonomian yang seimbang dimana secara agregatif tujuan tersebut harus serasi dan didukung oleh tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam tiap-tiap sektor dimana diharapkan tiap-tiap sektor dapat memberikan sumbangannya sesuai dengan peranannya masing-masing.

Secara regional pembangunan Daerah sebagai bagian dari wilayah pembangunan Nasional bertujuan untuk menghindari pertumbuhan antar wilayah yang tidak seimbang (regional inequality), atau dengan cara lain berusaha untuk menciptakan pertumbuhan antar wilayah yang seimbang (regional equality).

Dengan keseimbangan dan keserasian pertumbuhan tersebut, dimaksudkan adanya keseimbangan dan keserasian pertumbuhan baik antara pertumbuhan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dalam suatu untaian hierarchis dari wilayah-wilayah pembangunan dalam suatu system pewilayahan pembangunan Nasional maupun keserasian dan keseimbangan pertumbuhan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah pengaruhnya melalui proses polarisasi baik polarisasi tehnik, polarisasi income, polarisasi phsychologis maupun polarisasi geografis.

C. Prioritas Pembangunan Daerah.

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka dalam Pelita III Daerah Bali, prioritas pembangunan diletakkan pada Bidang Ekonomi dengan menitik beratkan pada sektor pertanian dalam arti yang luas menuju swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan jadi dan Pariwisata yang bermodal dasar Kebudayaan Bali yang bersumber pada Agama Hindu, serta industri kecil dan kerajinan yang menunjang sektor Pariwisata itu sendiri.
2. Sejalan dengan prioritas pembangunan bidang ekonomi tersebut, maka pembangunan dalam bidang sosial budaya, politik dan lain-lain akan ditingkatkan sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pembangunan bidang ekonomi itu sendiri.

D. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan.

1. Dalam Repelita III Daerah arah dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama Pelita II perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan kesejahteraan yang makin merata bagi seluruh rakyat, dan dengan demikian makin memperkokoh Ketahanan Nasional.
2. Pelaksanaan Pembangunan Daerah harus berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan Stabilitas Daerah dalam ruang lingkup Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis baik dibidang politik dan ekonomi, karena kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat dan kegoncangan ekonomi akan menghambat pembangunan. Dengan demikian Stabilitas Daerah dalam ruang lingkup Stabilitas Nasional memperlancar Pembangunan Daerah dan Pembangunan Daerah memperkuat Stabilitas Daerah dalam ruang lingkup Stabilitas Nasional.
3. Untuk memantapkan Stabilitas Daerah dalam ruang lingkup Stabilitas Nasional dibidang politik, haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan Bangsa serta makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya Stabilitas Daerah dalam ruang lingkup Stabilitas Nasional yang mantap, maka perlu adanya usaha-usaha pembinaan yang terus menerus terhadap aparatur Pemerintah pada umumnya dan aparatur Penegak Hukum pada khususnya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dan juga meningkatkan kewibawaannya. Usaha-usaha ini merupakan pembangunan dibidang politik, aparatur Pemerintah dan hukum, yang mana akan mendorong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Keadaan keamanan dan ketertiban umum perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan untuk menjamin terpeliharanya Stabilitas Daerah dalam ruang lingkup Stabilitas Nasional dan kelancaran pelaksanaan Repelita III.
5. Arah Pembangunan Daerah dalam tahap Pembangunan ini adalah usaha dalam rangka realisasi secara bertahap arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang bersasaran pada terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia. Untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila, sedang titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, sedangkan pembangunan diluar bidang ekonomi tersebut dilaksanakan seiring dan serasi dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi maka tersedianya sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan dibidang sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.
6. Pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi harus dilanjutkan bahkan ditingkatkan dari pada sebelumnya. Peningkatan pembangunan ekonomi berarti bertambahnya produksi barang dan jasa dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Dalam hubungan ini pengembangan bidang pertanian dan kepariwisataan termasuk pembangunan sarana-sarana dasar dan sarana penunjangannya dalam tahapan pembangunan ini harus diteruskan dan diperluas.

7. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Pelita III, harus dapat dicapai kenaikan produksi dan jasa diberbagai sektor pembangunan ekonomi yang meliputi sektor-sektor pertanian, pariwisata, industri, prasarana dan lain-lainnya. Dalam mendukung pembangunan diberbagai sektor tersebut yang harus selalu berorientasi pada perluasan kesempatan kerja dan penggunaan teknologi yang tepat guna atau teknologi yang padat karya.
8. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas perlu terus ditingkatkan melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, bukan saja dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekspor, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian besar rakyat, dalam rangka peningkatan harkat dan martabat rakyat pedesaan serta untuk menjadikan sektor pertanian semakin kuat guna mendukung perkembangan industri.
9. Pembangunan sektor industri perlu ditingkatkan dan diperluas, disamping untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produksi disektor industri, juga untuk makin menseimbangkan struktur ekonomi sehingga pada suatu saat perkembangan disektor industri didukung oleh pertanian yang kuat.
10. Untuk pembiayaan Pelita III diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena pembangunan itu semakin meningkat, maka diperlukan usaha-usaha untuk semakin menggerakkan dana-dana pembangunan baik melalui peningkatan penerimaan daerah/perpajakan daerah, penanaman modal sektor Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten), perkreditan, swadaya masyarakat. Dalam hubungan ini sistim perpajakan perlu disempurnakan agar kegiatan ekonomi semakin berkembang. Kemampuan daerah dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber daerah sendiri semakin meningkat, dan pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah semakin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Disamping itu sistim perpajakan harus pula dapat membantu menciptakan pola hidup sederhana, yang sangat penting untuk memperkokoh solidaritas sosial. Segala pajak harus didasarkan atas peraturan perundangan. Untuk itu diperlukan aparat perpajakan yang mampu dan bersih.
11. Disamping sumber pembiayaan tersebut diatas perlu pula ditingkatkan usaha untuk meningkatkan pendapatan devisa melalui ekspor dan pariwisata. Untuk ini perlu diambil langkah-langkah untuk mendorong ekspor dan meningkatkan pariwisata.
12. Penanaman modal asing di daerah sesuai kebijaksanaan Pemerintah Pusat dilakukan disektor-sektor yang produksinya belum memenuhi kebutuhan sendiri atau dalam negeri atau disektor-sektor yang memperluas ekspor dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan perkembangan perusahaan-perusahaan Nasional. Disamping itu penanaman modal asing dapat membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu yang secepatnya.
13. Dalam Pelita III Daerah langkah-langkah untuk meningkatkan produksi harus merupakan usaha yang terpadu dengan langkah-langkah perluasan kesempatan kerja. Demikian pula pertumbuhan produksi harus mendorong swadaya, prakarsa

dan partisipasi swasta serta seluruh masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

14. Perluasan kesempatan kerja dalam Pelita III Daerah merupakan kebutuhan yang tetap mendesak. Untuk itu diperlukan berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh seperti pendidikan keterampilan, pendidikan yang dapat menciptakan kegiatan kerja, pembangunan industri, pembangunan prasarana, kebijaksanaan pemilihan teknologi yang tepat guna dan sebagainya. Disamping itu usaha untuk memperluas kesempatan kerja dapat diusahakan dengan meningkatkan program bantuan pembangunan dan proyek padat karya di daerah pedesaan.
15. Penggunaan teknologi yang padat karya, diusahakan untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi yang tepat, yang mudah dipelihara dan sejauh mungkin menggunakan bahan-bahan dalam negeri, ini penting peranannya didalam mewujudkan sasaran-sasaran peningkatan hasil produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan.
16. Dalam usaha meratakan penyebaran hasil pembangunan, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan pedesaan yang lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada dan menanggulangi masalah-masalah yang mendesak. Dalam hubungan ini daerah-daerah minus dan daerah-daerah yang padat penduduknya perlu mendapat perhatian khusus, antara lain dalam rangka mengurangi derasnya perpindahan penduduk ke kota.
17. Salah satu segi yang penting dalam pembangunan adalah penggunaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini diperlukan sekali peningkatan inventarisasi dan evaluasi sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Demikian pula perlu ditingkatkan pemeliharaan terhadap sumber-sumber alam dan lingkungan hidup, sehingga terjamin kelestariannya, lebih-lebih dalam rangka pelaksanaan program "Bali Menuju Pulau Taman" (Bali yang indah dan lestari).
18. Salah satu aspek pembangunan ialah penggunaan tanah-tanah. Oleh karena itu demi peningkatan effisiensinya perlu diadakan penataan/perencanaan penggunaan tanah (Land Use Planning).
19. Untuk menanggulangi masalah kependudukan, pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang dalam Pelita II telah menunjukkan hasil yang baik, perlu diperluas dan diintensifkan agar dalam jangka panjang benar-benar dapat menjamin terkendalikannya pertumbuhan penduduk, sehingga dapat menciptakan keluarga sejahtera. Disamping itu untuk mengurangi kepadatan penduduk perlu ditingkatkan pelaksanaan transmigrasi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun transnigrasi spontan, dan perlu diadakan pengaturan penertiban penduduk yang berdomisili di Bali.
20. Untuk makin meratakan hasil-hasil pembangunan dalam Pelita III, maka perlu ditingkatkan program-program untuk meningkatkan penghasilan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan rendah, seperti nelayan, pekerja kerajinan rakyat, pengusaha kecil, petani penggarap yang tidak memiliki tanah dan sebagainya, dengan memberikan bantuan berupa kredit Bimas, Kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, kredit candak kulak dan berbagai macam kredit lainnya yang mendorong pemerataan kegiatan pembangunan serta pemerataan penghasilan.

21. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dipelbagai sektor maka koperasi diberi peranan dan ruang gerak yang luas. Dalam hubungan ini BUUD/KUD dan koperasi-koperasi primer lainnya ditingkatkan kemampuannya sehingga akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
22. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Disamping itu pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemampuan daerah dan masyarakat daerah itu sendiri untuk memperluas tersedianya sarana sosial budaya. Ini berarti makin meningkatnya pembangunan dibidang-bidang sosial budaya dan memperbesar kemampuan serta kesempatan rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian pembangunan dalam Pelita III Daerah makin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat, yang mana diharapkan dapat memperkecil jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian rakyat akan semakin sadar akan arti dan manfaat pembangunan, sehingga ini merupakan modal dan lebih meningkatkan partisipasinya untuk melanjutkan pembangunan tahap-tahap berikutnya.
23. Sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia maka Daerah Bali dalam menghadapi persoalan-persoalan pembangunannya baik persoalan-persoalan yang umum berlaku untuk semua Daerah, maupun persoalan-persoalan yang khusus antara lain bertalian dengan keadaan daerahnya sendiri dan di hubungkan dengan keinginan untuk mewujudkan pembangunan Daerah Bali secara bulat dan lestari dalam ruang lingkup pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan kesejahteraan seluruh rakyat, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bidang sosial budaya merupakan sektor dasar.
 - Bidang ekonomi produksi sebagai sektor utama.
 - Bidang sarana dan prasarana sebagai sektor penunjang.
24. Dari penganalisaan mengenai potensi-potensi bidang kegiatan pokok dalam bidang sosial ekonomi telah diperoleh kesimpulan-kesimpulan bahwa, meskipun untuk masa sekarang perluasan-perluasan usaha masih mungkin, namun untuk masa depan hal itu diperkirakan semakin sulit karena :
 - Terbatasnya efek-efek pembangunan yang dapat diharapkan dari pada perluasan-perluasan itu.
 - Dengan terbatasnya kemungkinan-kemungkinan perluasan, dan dihadapkan pada pertambahan penduduk yang terus menerus akan mengakibatkan desakan-desakan yang makin membesar pada sektor-sektor tradisional yang sekarang menjadi dasar penghidupan bagian terbesar dari pada penduduk.
25. Atas dasar keadaan yang demikian itu dan mengakibatkan tuntutan-tuntutan proses pembangunan maka diperlukan jawaban mengenai masalah "bagaimana mempersiapkan penampungan perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan Daerah dengan penciptaan mata pencaharian yang sesuai, dengan tetap memperhatikan adanya suatu lingkungan hidup yang serasi". Untuk ini dalam garis besarnya masalah penyelesaian persoalan mencakup dua sektor regional yang penting yaitu :
 - a. Sektor pedesaan sebagai faktor yang established dalam kehidupan daerah memerlukan pengaturan siasat-siasat perkembangan-perkembangan disektor ini yang sejajar dan sesuai dengan arah perubahan yang dikehendaki.

- b. Sektor perkotaan sebagai sektor yang akan meningkatkan peranan dalam kegiatan-kegiatan regional dimasa depan, memerlukan pengaturan lingkungan2 dalam wilayah kota itu sendiri secara tertib, aman, sehat maupun antar kota itu sendiri dengan daerah belakangnya.

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka usaha-usaha dimasing-masing sektor itu harus diselenggarakan secara sinkron dan simultan, dalam mana tindakan-tindakan harus merupakan kesatuan dalam rangka perkembangan yang integral dan menyeluruh, sehingga tercipta suatu suasana pembangunan yang rationable yang menjamin keseimbangan diberbagai bidang dalam pelaksanaan gerak pembangunan di Daerah.

26. Yang menjadi pokok pertimbangan dalam penentuan siasat sinkronisasi itu adalah perkembangan bertahap yang seimbang pada setiap periode pertumbuhan yang penekanannya pada :

- a. Pengaturan dan pengendalian desakan-desakan urbanisasi kekota-kota.
- b. Redistribusi penduduk dimasa depan berdasarkan pola kegiatan yang optimal.

27. Untuk ini digunakan pendekatan-pendekatan konsepsional sebagai berikut :

- a. Konsep keseimbangan perkembangan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan (rural urban balance development)

Keseimbangan perkembangan ini berarti pengendalian pembangunan desa melalui peningkatan pembangunan pedesaan untuk sejauh mungkin dapat mencegah terjadinya urbanisasi kekota-kota yang akan menimbulkan gangguan keseimbangan. Pengendalian tersebut secara pasif berarti meneruskan pekerjaan-pekerjaan pembangunan routine dipedesaan dan dengan secara selektif melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dapat mengakibatkan perubahan struktural yang berakibat mempersempit lapangan kerja. Sedangkan secara aktif ditekankan pada usaha untuk meningkatkan kemampuan swadaya penduduk desa kearah pembangunan yang produktif (umpamanya perletakkan prasarana bagi pembangunan desa : pembangunan jalan-jalan, saluran irigasi dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang bersifat lebih padat karya). Pengendalian ini secara sinkron dan simultan, didampingi oleh pembangunan berdasarkan konsep keseimbangan perkembangan diseluruh daerah antara lain melalui sistim regionalisasi dengan pusat pertumbuhannya. Adapun perwilayahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Wilayah pembangunan Bali Utara, meliputi Kabupaten Buleleng dengan pusat pengembangannya Singaraja. Pembangunan disini ditekankan pada produksi pertanian, perdagangan (kelapa, kopi dan ternak) dengan pelabuhan Celukan Bawang sebagai pelabuhan eksport - import diwilayah tersebut dengan pusat-pusat perdagangannya nanti untuk daerah itu : Seririt dan Singaraja. Dan dikembangkan pula untuk kemungkinan sebagai daerah industri di Buleleng Barat. Perikanan dapat pula dikembangkan Sarana pelabuhan Celukan Bawang merupakan pendukung disamping sarana perhubungan darat bagi kelancaran lalu lintas perekonomian.
- 2). Wilayah Pembangunan Bali Barat, meliputi Kabupaten Jembrana dengan pusat pengembangannya Negara. Pembangunan disini ditekankan pada produksi pangan, tanaman eksport, perdagangan antar pulau dengan pelabuhan Gilimanuk, perikanan dan industri pengalengan atau pengolahan hasil

pertanian. Disamping itu pelabuhan Gilimanuk sebagai sarana perhubungan mempunyai arti penting disamping pelabuhan ikan Pengambang.

- 3). Wilayah Pembangunan Bali Tengah, meliputi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar dengan pusat pengembangannya Denpasar. Pembangunan disini ditekankan pada : pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan proteksi lingkungan serta industri dan kerajinan/kegiatan2 yang menunjang kegiatan pariwisata. Tourist Resort (Sanur, Kuta dan Nusa Dua) terletak diwilayah ini dan sarana perhubungan adalah pelabuhan Benoa (pelabuhan Samudra) dan Lapangan Udara Internasional Ngurah Rai.
- 4). Wilayah Pembangunan Bali Timur, meliputi Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dengan pusat pengembangannya Amlapura. Pembangunan disini ditekankan pada : perkebunan, produksi pertanian dan ternak (khusus untuk ekspor) dan karena keindahan panoramanya akan banyak dikunjungi wisatawan dan pengembangan kepariwisataan akan dilola setepat-tepatnya.
- 5). Wilayah Pembangunan Khusus, meliputi Kabupaten Klungkung dengan Daerah Kritis Nusa Penida dengan pusat pengembangannya Klungkung. Pembangunan disini ditekankan pada perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kepariwisataan dan perdagangan.

b. Konsep keseimbangan perkembangan antara unsur-unsur kota (Pusat-pusat wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan).

Kebijaksanaan yang ditempuh dalam keseimbangan pembangunan ini adalah mengawasi secara khusus kota yang berkembang dengan pesatnya karena aktivitas-aktivitas yang terkumpul didaerah sekitarnya. Berikutnya pengembangan kota-kota yang mempunyai potensi dalam fasilitas-fasilitas yang pada waktu sekarang belum secara optimal digunakan. Prioritas perkembangan kota tersebut dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan dalam konsep keseimbangan ini dilihat secara integral dalam pembangunan daerah berarti juga mendistribusikan kesempatan kerja penduduk berlebih dari sektor pertanian.

28. Program stabilitas yang dinamis dalam setiap tahapan pembangunan.

Pada setiap tahapan perlu ditentukan suatu program stabilitas yang dinamis sebagai landasan yang kuat dan mantap dalam pertumbuhan selanjutnya.

Program ini dimaksudkan untuk melandasi perkembangan dari pembangunan sebelumnya kearah pembangunan yang lebih meningkat berikutnya.

Sesuai dengan arah kebijaksanaan yang telah diuraikan diatas yakni : pengembangan atas prinsip keseimbangan dalam perkembangan, dimana harus didahului dengan program stabilisasi yang dinamis maka rencana operasional kita arahkan pada wilayah pengembangannya (growth centre) agar dapat lebih berfungsi. Untuk menunjang perkembangan dari growth centre tersebut maka ditempuh penentuan Sub Region - Sub Region diseluruh Kabupaten di Bali dimana Sub Region ini memiliki *growth centrenya dan mempunyai fungsi sebagai berikut :*

- a. Bersifat menunjang
- b. Menyerap tenaga kerja untuk menghindari urbanisasi.

- c. Meratakan dan menyebarkan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomis-sosial dan lain-lainnya.
 - d. Dan lain-lain.
29. Untuk menentukan Sub-Sub Region diatas, harus dipertimbangkan dan diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Potensi yang menyangga pembangunan baik yang menyangkut pola fasilitas umum, fisik prasarana, faktor ekonomi sosial dan lain-lain.
 - b. Kemungkinan rintangan-rintangan yang bersumber pada faktor sosial yang dapat menghambat pembangunan.
 - c. Mempunyai lokasi yang baik, geografis yang baik dalam arti mudah berkomunikasi antar Sub Region yang satu dengan Sub Region lainnya, Sub Region dengan growth centre dari pada Region sehingga mencerminkan keseimbangan.

E. Sasaran Pembangunan.

E K O N O M I

1. Pertanian :

Sektor pertanian merupakan titik berat pembangunan Daerah, oleh karenanya didalam proses pembangunan Daerah sektor ini, sesuai potensi yang ada diusahakan pengembangannya secara berencana dan bertahap.

Untuk tahap Repelita III, sektor pertanian dalam arti luas (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan Kehutanan) dalam melakukan pembangunan yang bertujuan *meningkatkan income, perbaikan gizi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja* lewat peningkatan produksi, perbaikan Institusi sosial dan lembaga pemasaran.

Berkait dengan maksud demikian dengan berpegang pada Trimatra Pembangunan Pertanian (Pembinaan usaha tani, komoditi dan wilayah terpadu) yang didasari oleh azas-azas Trilogi Pembangunan, akan dicoba untuk mewujudkan centra-centra produksi yang spesifik sesuai dengan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, sehingga hasil pembangunan disektor ini dapat diharapkan benar-benar merupakan landasan yang cukup mantap untuk pembangunan tahap berikutnya.

a. Pertanian Pangan.

Masalah produksi, hubungan luas tanaman dan luas panen, rata-rata produksi untuk komoditi bahan-bahan makanan adalah merupakan masalah-masalah pokok yang dipersoalkan dalam Repelita III. Guna mewujudkan sumbangan yang diharapkan dari sub sektor ini bagi pembangunan baik yang berkait dengan peningkatan income disektor bersangkutan, perbaikan gizi masyarakat maupun penciptaan lapangan kerja diusahakan penjabaran kegiatan sebagai berikut :

- 1). Dalam masalah produksi disamping usaha peningkatan volume produksi, kesejajaran penanganan komoditi padi, palawija dan horticultura harus dilaksanakan secara mantap, serta mengkaitkannya dengan sektor-sektor lain seperti industri dan pariwisata. Khusus dalam hal yang menyangkut produksi horticultura, per-angrekan dan apriari perlu direncanakan, centra-centra produksi yang didasarkan kepada prinsip ekonomis-rasional.

- 2). Dalam masalah hubungan luas tanaman dan luas panen, perlu dilaksanakan pemantapan Bimas, penggunaan tanaman jenis unggul, intensifikasi dan efisiensi penggunaan tanah dan air, penyempurnaan dan peningkatan sistem pencegahan dan pembrantasan hama.
- 3). Dalam rangka usaha peningkatan income dan gizi masyarakat perlu dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan baik yang menyangkut pola makanan yang bergizi maupun penyuluhan tentang efisiensi dan intensifikasi pemanfaatan pekarangan. Disamping itu penelitian tentang pola dan sistem pemasaran yang tepat perlu dilaksanakan untuk menjamin kontinuitas produksi.

b. Perkebunan.

Keadaan tingkat kesuburan tanah, ketinggian, type iklim merupakan dasar penentuan jenis tanaman perkebunan yang dapat diusahakan dalam suatu wilayah tertentu, atau dengan kata lain keadaan situasi dan kondisi lingkungan adalah merupakan dasar daripada diversifikasi jenis tanaman yang ditanam pada suatu wilayah tertentu.

Tanaman perkebunan yang dewasa ini terdapat pada sub sektor perkebunan di Bali meliputi 2 golongan :

- 1). Tanaman perkebunan yang sudah berkembang seperti kopi, kelapa dengan keadaan sebahagian besar sudah tua dan untuk menjamin kontinuitas produksi perlu diremajakan.
- 2). Tanaman perkebunan yang sedang dikembangkan dalam rangka usaha diversifikasi jenis tanaman dan efisiensi penggunaan tanah, seperti cengkeh, panili, tambahan, sereh wangi.

Untuk pemantapan usaha pengelolaan atas kedua golongan tanaman perkebunan tersebut ternyata terdapat masalah kekurangan bibit dan tenaga trampil.

Selanjutnya dalam Repelita III dalam rangka usaha mewujudkan sumbangan pembangunan yang diharap dari sub sektor perkebunan yakni :

- 1). peningkatan income pada sektor perkebunan
- 2). penunjang kegiatan sektor lain
- 3). menciptakan lapangan kerja
- 4). pelestarian lingkungan

ditetapkan pencapaian sasaran melalui kegiatan-kegiatan :

- 1). peremajaan tanaman kopi dan kelapa
- 2). diversifikasi tanaman perkebunan
- 3). pemantapan penyuluhan dan pembinaan petani tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan peningkatan hasil-hasil perkebunan
- 4). pengenalan usaha-usaha processing hasil-hasil perkebunan
- 5). investigasi terhadap kemungkinan pasar bagi hasil perkebunan yang telah dihasilkan dan hasil-hasil yang diminta oleh pasar dalam rangka usaha memperoleh ketepatan pemilihan tanaman komoditi perkebunan yang menguntungkan.

c. Peternakan.

Dewasa ini Sub sektor Peternakan berada pada phase transisi/peralihan dari sistim pemeliharaan ternak tradisional keusaha peternakan yang bersifat ekonomis rasional.

Berkait dengan keadaan demikian ini dihubungkan dengan peranan sub sektor peternakan dalam proses pembangunan perlu diusahakan peningkatan kegiatan peternakan baik yang menyangkut masalah pembinaan usaha peternakan maupun usaha peningkatan produksi hasil-hasil peternakan dalam jumlah (populasi) maupun mutunya. Untuk mewujudkan maksud tersebut karenanya diperlukan langkah2 sebagai berikut :

- 1). Perbaikan sistim pemeliharaan ternak.
- 2). Pembinaan para peternak.
- 3). Iseminasi buatan.
- 4). Perbaikan mutu makanan ternak.
- 5). Bimas.
- 6). Pengenalan pengusahaan aneka ternak (merpati, kelinci dsb.nya).

d. Perikanan.

Dalam rangka usaha pelestarian dan pemanfaatan perairan baik laut danau, sungai, tambak maupun perairan umum lainnya dibutuhkan peningkatan berbagai kegiatan yang bersangkutan paut dengan Sub Sektor Perikanan, baik darat, paya, maupun laut dengan menggunakan peralatan tradisional, semi modern maupun modern disertai dengan pembinaan alih teknologi dan penentuan daerah-daerah contra produksi.

Kegiatan2 ini dilaksanakan dalam rangka usaha mewujudkan peranan yang diharapkan dari sub sektor perikanan dalam hal :

- 1). peningkatan gizi makanan bagi masyarakat (protein hewani/dari ikan, protein nabati/agar2).
- 2). peningkatan income nelayan dan petani ikan.
- 3). pelestarian perairan (untuk kepentingan wisata).
- 4). pembinaan dan penyuluhan terhadap petani ikan untuk menambah keterampilan baik dalam hal pemeliharaan, penangkapan, processing maupun pemasaran.

1. Kehutanan.

1). Luas Kawasan Hutan.

Hutan bagi Daerah Bali, dewasa ini memerlukan perhatian yang cukup serius. Karena disamping adanya keharusan perbaikan dan pemeliharaan hutan lewat reboisasi, perbaikan batas-batas hutan dengan pembuatan jalan setapak/rintisan, juga dibutuhkan tambahan luas hutan sehingga mencapai luas ideal 30 dari areal Pulau Bali. (Hutan pada saat ini diperkirakan 22,19).

Untuk penambahan luas kawasan hutan ini menuntut adanya perubahan terhadap pola peruntukkan tanah didaerah Bali. Setelah terjadi perubahan status peruntukkan tersebut, perlu dipikirkan dana untuk mengambil alih tanah bersangkutan dari pemiliknya, baik tanah2 yang produktif maupun tanah2 yang kritis.

2). Peningkatan fungsi hutan.

Dalam rangka usaha peningkatan fungsi hutan baik dilihat dari fungsi lindung (penyelamatan hutan, tanah dan air) maupun fungsi ekonomis (hutan produksi, hutan wisata, processing hasil-hasil hutan) diperlukan peningkatan dari usaha-usaha yang telah dilaksanakan selama Repelita II, serta pemanfaatan usaha pelaksanaan reboisasi dengan memanfaatkan dana Inpres Penghijauan dan Reboisasi, atau dana lainnya yang ditujukan untuk kepentingan penghijauan dan reboisasi serta pengawetan alam Bali.

Dana Daerah yang bersifat menunjang program Nasional pada Sub Sektor Kehutanan ini diarahkan kepada kegiatan-kegiatan :

- peningkatan produksi kehutanan.
- pembinaan hutan.
- pemeliharaan batas-batas hutan.
- perlengkapan peralatan bagi aparat kehutanan berupa sarana kerja.

Dalam kaitan dengan fungsi hydroorologi dari hutan, usaha penghijauan mempunyai peranan sangat penting dan perlu ditingkatkan usaha penghijauan sekaligus untuk kepentingan perbaikan tanah kritis, pemeliharaan kesuburan tanah dan lain-lainnya.

2. Industri.

- a. Sektor industri bagi Daerah Bali merupakan kegiatan usaha masyarakat yang sedang dikembangkan. Kegiatan industri ini perlu dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk dapat menampung dan menyerap tenaga kerja yang sementara ini merupakan tenaga-tenaga penganggur yang tak kentara pada sektor pertanian dalam arti luas.
- b. Mengingat keadaan dan keberadaan Daerah Bali yang berdasarkan inventarisasi potensi kekayaan alam menunjukkan kenyataan bahwa Daerah Bali miskin akan hasil-hasil tambang (sementara penelitian yang lebih mendalam belum diadakan) kiranya industri-industri kecil yang cocok dikembangkan adalah industri-industri kecil/industri kerajinan yang padat karya.
- c. Sementara ini kegiatan-kegiatan industri yang telah dan sedang dilaksanakan serta perlu ditingkatkan oleh masyarakat adalah kegiatan-kegiatan industri kecil dalam bentuk usaha-usaha kecil dibidang kerajinan, produksi bahan-bahan bangunan, kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya.

Peranan pemerintah dalam kegiatan industri ini berupa kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pembinaan-pembinaan dibidang teknis serta management perusahaan modern lewat proyek-proyek BIPIK. Penyuluhan dan pembinaan tersebut perlu ditingkatkan terutama di centre-centre produksi.

- d. Untuk menjaga kelestarian alam perlu adanya peningkatan penyuluhan dan pilot proyek menuju usaha pengawasan terhadap kegiatan usaha industri yang menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap keseimbangan ekologi. Dalam hal ini misalnya proyek komporisasi dalam kegiatan-kegiatan produksi yang menggunakan kayu api sebagai bahan bakar, dan usaha kapur yang menggunakan karang laut sebagai bahan baku. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk

menghindari penebangan/pencurian kayu hutan dan pencurian karang di laut, dan untuk bahan-baku kapur disarankan menggunakan bahan kapur gunung.

3. P e r t a m b a n g a n .

Sampai saat ini di Bali belum diketemukan adanya hasil-hasil tambang yang berarti, dan perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam.

4. E n e r g i .

Dalam rangka usaha memanfaatkan sumber-sumber energi alam dalam Repe-
lita III diusahakan penelitian-penelitian untuk menemukan sumber-sumber baru. Sementara ini baru diketemukan sumber energi panas bumi (geo thermal) didekat Danau Beratan. Ini perlu dikembangkan. Disamping usaha pengembangan tenaga air seperti rencana PLTA di Sungai Ayung. Tenaga listrik melalui PLTD perlu di-
kembangkan/diperluas, lebih-lebih dalam rangka pelaksanaan listrik masuk desa yang telah dilaksanakan dalam Pelita II.

5. P r a s a r a n a .

a. Mengingat kegiatan utama penduduk daerah Bali adalah pertanian dalam arti luas dan industri kerajinan rakyat yang berkaitan dengan industri pariwisata, maka penyediaan prasarana/sarana diarahkan untuk dapat menunjang peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

b. P e n g a i r a n .

Sesuai dengan keadaan alamnya maka prasarana yang dibutuhkan untuk kegi-
atan pertanian pangan adalah penyediaan dan pengembangan irigasi sedang kecil, dimana subak sebagai organisasi pemakai air akan memberikan partisipasi secara aktif dalam usaha pemeliharaan saluran dan bangunan pengairan. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana pengairan yang ditujukan untuk peningkatan produksi pangan harus diikuti dengan usaha-usaha menjaga kelestarian sumber-sumber pengairan.

c. P e r l i s t r i k a n .

Untuk memenuhi kebutuhan akan listrik baik masyarakat kota maupun pede-
saan, maka kapasitas yang ada perlu ditingkatkan dan jaringan distribusinya diperluas sehingga dapat mendorong/merangsang kegiatan ekonomi antara lain menunjang timbulnya industri kecil.

d. P e r h u b u n g a n .

1). A n g k u t a n D a r a t .

Pengangkutan tidak lain dari pemindahan barang/jasa dan manusia dari tempat satu ketempat yang lain, yang timbul karena adanya kegiatan da-
lam masyarakat. Pengangkutan akan terjadi antara tempat dimana terda-
pat kegiatan penduduk, terutama antara kota dengan kota dan kota de-
ngan pedusunan. Jadi yang penting dalam jaringan-jaringan angkutan darat adalah adanya jaringan-jaringan jalan yang dapat memperlancar arus kegiatan barang/jasa keseluruhan daerah yang terpencil. Peningkatan dan pengembangan sektor ini membawa serta berkembangnya usaha-usaha dibidang jasa, yang cukup menyerap tenaga kerja dan akan memberikan keuntungan yang optimal bagi kegiatan perekonomian masyarakat.

2). Angkutan Laut/Ferry.

Dengan terdapatnya empat pelabuhan di Bali (Benoa, Gilimanuk, Buleleng, Padangbai), kondisinya sangat memerlukan perhatian dalam hal pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan pelabuhan serta fasilitasnya, sehingga tersedia pelayanan angkutan yang lebih luas, teratur dan lancar, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Untuk dapat mencapai hasil yang memuaskan yaitu kondisi yang memenuhi persyaratan-persyaratan prioritas diberikan kepada perbaikan fasilitas pelabuhan Benoa, Celukan Bawang, Teluk Padang termasuk pembangunan pelabuhan ferrynya. Karena angkutan ferry memegang peranan penting sebagai extention dari pada kegiatan angkutan darat yang menghubungkan Bali dengan Jawa (Gilimanuk-Ketapang) dan Bali dengan Lombok (Amuk dengan Lembar/Ampenan).

3). Angkutan Udara.

Dengan meningkatnya jenis armada perhubungan Udara, maka fasilitas-prasarana pelabuhan udara International Ngurah Rai perlu ditingkatkan, sehingga terjamin keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan udara dengan sarana yang disediakan. Serta pelayanan yang lebih lancar dan teratur. Pelabuhan Udara International Ngurah Rai (Denpasar) ini, merupakan salah satu pintu gerbang utama yang menghubungkan Bali (Indonesia) dengan Luar Negeri, khususnya bagi wisatawan asing yang setiap tahun meningkat.

4). J a l a n.

Program transport perlu diintergrasikan dengan pembangunan jaringan jalan-jalan dan sistim pengaturan lalu lintas, khususnya di kota-kota. Program pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan/peluasan jaringan jalan yang memperlancar kegiatan ekonomi khususnya disektor perdagangan dan pariwisata, masih perlu ditingkatkan dan ditambahkan dengan pembangunan jalan baru untuk membuka isolasi suatu daerah menuju desa-desa yang teresolir.

c. Pos dan Giro.

Memperluas jaringan pelayanan pos semaksimal mungkin sampai kedesa-desa dan meningkatkan mutu pelayanan service serta efektifitas penyelenggaraannya.

f. Telekomunikasi.

Pembangunan sentral telepon otomatis dengan perluasan jaringannya diseluruh Kabupaten serta fasilitas sarananya. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

g. Air Minum.

Peningkatan penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan dan kota. Disamping itu mendorong dan merangsang kegiatan industri. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam usaha pemanfaatan dan pengamanan terhadap sumber-sumber air yang ada dan mencegah pencemaran air serta lingkungannya.

h. P e r k o t a a n .

- 1). Pengintergrasikan kegiatan dimasing-masing ibu kota Kabupaten dan pedesaan untuk mengurangi terlalu mengelompoknya penduduk hanya pada satu kota, tapi diimbangi pula perkembangan pedesaan sesuai dengan prinsip U.R.B.
- 2). Perbaiki tata lingkungan dan tata guna tanah diperkotaan.
- 3). Perencanaan kota harus diadakan untuk mengendalikan perkembangan kota dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pengembangan agar sesuai rencana.
- 4). Keresasian dalam sistim perkotaan dengan memberi prioritas pada kota Denpasar dan ibu kota Kabupaten lainnya, termasuk tempat/wilayah tertentu yang perkembangannya relatif cepat.

6. P a r i w i s a t a .

- a. Disamping pertanian, maka sektor pariwisata adalah merupakan titik berat pembangunan Daerah Bali. Oleh karena itu, didalam Repelita III usaha-usaha pembangunan dan pengembangan pariwisata perlu lebih ditingkatkan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan devisa bagi Negara.
- b. Pengembangan dan pembangunan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan Daerah Bali, karena pariwisata yang dilaksanakan di Bali adalah pariwisata budaya yang bersumber pada Agama Hindu.
- c. Untuk memajukan pengembangan dan pembangunan pariwisata sebagai disebutkan diatas, perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain dibidang :
 1. Promosi,
 2. Penyediaan fasilitas,
 3. Mutu dan kelancaran pelayanan,
 4. Pembinaan dan pemeliharaan terhadap obyek-obyek pariwisata,
 5. Pembinaan industri pariwisata,
 6. Pembinaan Lembaga Pendidikan Kepariwisataan, dan Kursus-kursus Kepariwisataan lainnya,
 7. Pemerataan pengembangan kepariwisataan.

7. P e r d a g a n g a n .

- a. Kegiatan sektor perdagangan merupakan kegiatan perantara yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Dari kegiatan ini akan diperoleh jasa sebagai imbalan hasil usaha. Kegiatan perdagangan yang dilaksanakan dan berkembang selama ini di daerah Bali meliputi kegiatan perdagangan lokal, kegiatan perdagangan inter insuler, kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor - import).
- Dalam Repelita III atas dasar pengalaman tahun-tahun terdahulu, diusahakan peningkatan kegiatan sektor perdagangan guna dapat meningkatkan kedudukan dan peranan pedagang ekonomi lemah dalam proses pembangunan. Disamping itu pembinaan disektor perdagangan ini dimaksudkan juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor lain seperti sektor industri, pertanian, pariwisata

dalam rangka mempermudah penyampaian barang-barang hasil produksinya kepada para konsumennya.

b. Untuk maksud demikian itu perlu diwujudkan :

Sarana-sarana penunjang kegiatan perdagangan yang meliputi sarana fisik (pasar, show-room, design centre, jembatan timbang, tempat pengujian barang dan sebagainya), sarana non fisik yang meliputi peraturan-peraturan, yang dapat diharapkan mempermudah procedure proses pelaksanaan kegiatan perdagangan.

Hal ini penting untuk diwujudkan agar dalam dunia perdagangan yang semakin mengarah kepada hukum-hukum pasar para pengusaha ekonomi lemah mampu menghadapi persaingan-persaingan, khususnya dalam perdagangan internasional yang menyangkut komoditi ekspor.

8. Koperasi.

a. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Oleh karena itu diharapkan agar koperasi benar-benar bisa menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

b. Dalam usaha untuk meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian ialah meningkatkan ketrampilan management, dan pemupukan modal dari para anggota koperasi.

c. Sepadan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, peranan BUUD/KUD dan koperasi lainnya perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan, sehingga benar-benar bisa tumbuh menjadi koperasi primer desa yang tangguh dan mampu menjadi tulang punggung ekonomi Desa.

d. Akhirnya diharapkan pula agar koperasi dapat digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

9. Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

a. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/dunia swasta dalam pembangunan, perlu diciptakan iklim yang sehat yang diperlukan kelancaran usaha, antara lain dengan jalan mengusahakan ketenteraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perijinan, dan lain sebagainya.

b. Pembinaan usaha golongan ekonomi lemah dilaksanakan antara lain dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, kursus-kursus serta melakukan pendekatan terhadap Bank agar prosedur pemberian kredit dipermudah dan syarat-syaratnya dipelunak.

c. Jenis-jenis usaha tertentu seperti usaha-usaha kerajinan yang umumnya bersifat tradisional dan merupakan usaha golongan ekonomi lemah, perlu mendapat perlindungan dan pembinaan.

10. Tenaga Kerja.

a. Pertambahan angkatan kerja yang setiap tahunnya terus menerus meningkat, perlu diimbangi dengan adanya perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, program-program pembangunan baik sektoral maupun Regional agar senantiasa diusahakan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian maka disamping peningkatan produksi, sekaligus akan dapat dicapai pemerataan.

an hasil pembangunan karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.

- b. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang bersifat terpadu dalam rangka pembinaan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja serta pemberian informasi yang seluas-luasnya mengenai pasaran kerja.
- c. Dalam rangka pembinaan hubungan perburuhan perlu dibina kerja sama yang serasi antara buruh, pengusaha dan Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

11. Transmigrasi.

- a. Pelaksanaan program transmigrasi perlu ditingkatkan dengan jalan meningkatkan penyuluhan (baik secara visual maupun lisan) kepada masyarakat, khususnya kepada penduduk di daerah-daerah kritis dan daerah-daerah pertanian yang penduduknya relatif padat. Dengan demikian diharapkan mereka akan mau bertransmigrasi sehingga ditempat baru dapat meningkatkan tarap hidup mereka.
- b. Disamping Transmigrasi yang langsung digerakkan oleh Pemerintah, maka transmigrasi spontan perlu lebih didorong. Dalam hubungan ini, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan/paket dana dalam batas-batas kemampuannya yang ada.
- c. Oleh karena penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektoral maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi yang lebih mantap antara Pemerintah Pusat, Daerah Pengirim, Daerah Penerima dan Instansi-Instansi lainnya (misalnya melalui BP2 DT).

12. Pembangunan Daerah Tingkat II.

- a. Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksudkan untuk menumbuhkan laju pertumbuhan antar daerah yang sesuai dan selaras.
- b. Dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II, diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat, kemampuan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah guna menuju peningkatan masing-masing Daerah Tingkat II.
- c. Pembangunan Daerah Tingkat II, perlu juga memperhatikan kerjasama antar Kabupaten dalam mewujudkan laju pertumbuhan pembangunan yang seimbang.

13. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

- a. Kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber alam perlu lebih ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih mengenal sumber-sumber alam hutan, tanah, air dan energi bagi pembangunan Bali Menuju Pulau Taman (Bali yang lestari).
- b. Dalam penelitian, penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber alam, serta dalam pembinaan lingkungan teknologi yang sesuai sehingga mutu dan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan.
- c. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksama terhadap pengaruh bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Penilaian tersebut perlu dilakukan baik secara sektoral maupun regional dan untuk itu perlu dikembangkan mutu baku lingkungan hidup yang khas Bali.

- d. Rehabilitasi sumber2 alam yang berupa tanah dan air yang rusak perlu lebih ditingkatkan lagi melalui pendekatan terpadu daerah aliran sungai dan wilayah. Dalam hubungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan.
- e. Pendayagunaan daerah pantai dan laut perlu ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelesatiran lingkungan hidup.
- f. Dalam Pembangunan pemukiman diberikan prioritas kepada perbaikan lingkungan hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA.

1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Arti pembangunan hendaknya ditekankan pada arti yang sebenarnya yakni bertujuan membangun manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu dalam sasaran pembangunan tidak saja dititik beratkan kepada pembangunan bidang fisik, akan tetapi perhatian yang sama ditujukan juga kepada pembangunan moral agama sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka ditetapkan langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut :

- 1). Membina serta meningkatkan kesadaran umat beragama dalam rangka tetap terpeliharanya toleransi sesama umat beragama.
- 2). Bantuan perbaikan dan peningkatan fasilitas tempat beribadah.
- 3). Bantuan dan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan Agama.
- 4). Pembinaan Desa Adat dalam rangka usaha peningkatan peranan serta partisipasinya dalam pembangunan.

2. Pendidikan.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain dengan mengembangkan fungsi lembaga pendidikan formil yang telah ada, antara lain juga melalui pengembangan dan pembinaan pendidikan non formil akan dapat berperanan untuk meningkatkan kecerdasan serta keterampilan terutama terhadap anak-anak yang putus sekolah.

Dalam sektor pendidikan sasaran pembangunan akan dititik beratkan pada langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Pembinaan Pendidikan Dasar/Lanjutan Pertama/Lanjutan Atas/Perguruan Tinggi.
- 2). Pembinaan Pendidikan non formil.
- 3). Pembinaan Pendidikan Kejuruan.
- 4). Peningkatan Prasarana Pendidikan.
- 5). Pengembangan sistim pendidikan yang dikenal dengan sistim PAMONG (Pendidikan non formil).

3. Kebudayaan.

Kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan sedapat mungkin diarahkan kepada penumbuhan dan penumpukan watak yang mencerminkan ciri khas kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai antara lain :

- 1). Pengembangan seni budaya daerah dan aspek budaya umumnya yang sesuai dengan kepribadian bangsa.
- 2). Penyelamatan dan pemeliharaan warisan Budaya Daerah dan Nasional.
- 3). Pembinaan/pengembangan bahasa dan kesusastraan daerah.
- 4). peningkatan pembinaan kesenian daerah yang dapat memperkaya perbendaharaan kebudayaan Nasional dengan beraneka ragam kesenian daerah.

4. Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi.

Untuk menyusun suatu rencana Pembangunan sangat diperlukan adanya data yang cukup lengkap dan dapat dipercaya, karena dengan data yang demikian maka untuk menetapkan garis besar arah dan kebijaksanaan pembangunan akan lebih mudah dilakukan. Untuk mendapatkan data yang terperinci dan dapat dipertanggung jawabkan, seyogyanya berdasarkan pada hasil-hasil penelitian.

Didaerah Bali penelitian/survey sudah cukup banyak dilakukan, namun karena hasil penelitian tersebut tidak disebar luaskan maka diantara tenaga-tenaga peneliti tidak saling mengetahui penelitian apa yang telah, yang sedang ataupun yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang melakukan penelitian. Hal ini akan dapat mengakibatkan terjadinya duplikasi penelitian yang mana akan menimbulkan pemborosan baik dana maupun tenaga. Demikian juga mengenai pemilihan terhadap teknologi yang akan diterapkan didaerah Bali harus betul-betul diarahkan pada teknologi yang tepat guna atau teknologi yang padat karya. Kebijaksanaan terhadap pemilihan teknologi yang tepat guna/teknologi yang padat karya ini diharapkan akan dapat menunjang peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Pemasukan teknologi dari luar daerah atau luar negeri pada dasarnya tidak selalu relevan dengan kondisi daerah Bali sendiri. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas maka arah dan kebijaksanaan yang menyangkut bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi dapat diarahkan pada :

- a. Penyempurnaan/Pengembangan Statistik.
- b. Pengadaan/Peningkatan sistim informasi kegiatan penelitian.
- c. Peningkatan jumlah dan mutu penelitian yang relevan dengan prioritas pembangunan Daerah.
- d. Penerapan teknologi yang tepat guna/teknologi yang padat karya, sesuai dengan kondisi daerah Bali.

5. Kesehatan.

Untuk memperbaiki tingkat kesehatan penduduk, maka kesadaran masyarakat mengenai arti hidup sehat harus diusahakan, dan dilain pihak agar diusahakan follow-up lebih lanjut tentang cara-cara hidup yang memenuhi syarat kesehatan, baik yang menyangkut kesehatan perorangan maupun kesehatan lingkungan.

Didalam rangka mencapai sasaran tersebut, kebijaksanaan dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut antara lain :

- 1). Mengusahakan agar pelayanan kesehatan berada sedekat mungkin dengan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
- 2). Tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan yang sejauh mungkin dapat dijangkau oleh kemampuan masyarakat.
- 3). Peningkatan nilai gizi makanan rakyat.
- 4). Dalam pelaksanaan kesehatan diutamakan usaha kesehatan preventif.
- 5). Pemberantasan penyakit menular.
- 6). Mengusahakan air minum sehat (bersih) perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

6. Keluarga Berencana.

Salah satu usaha untuk menurunkan kecepatan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, terutama dilakukan melalui program Keluarga Berencana.

Agar program Keluarga Berencana dapat berjalan baik, perlu adanya usaha-usaha antara lain sebagai berikut :

- 1). Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di desa melalui sistim Banjar.
- 2). Meningkatkan pengadaan fasilitas program K.B. termasuk pula tenaga medisnya sebagai faktor primer untuk dapat memperlancar pelaksanaan program tersebut.
- 3). Jumlah peserta Keluarga Berencana ditingkatkan atas dasar kesadaran dan sukarela, memelihara kelestarian peserta Keluarga Berencana yang telah ada.

7. Kependudukan.

Mengenai kependudukan, permasalahan yang pokok adalah bertambahnya penduduk yang sangat cepat disatu pihak, dan dilain pihak tanah yang terbatas dalam artian wadah potensi (daerah) penampungan yang tetap dan terbatas. Disamping itu aktivitas penduduk terbatas pula, adanya income percapita masih rendah, untuk itu perlu dipertahankan batas minimal pemilikan tanah garapan seluas 2 ha. Dalam hubungan ini usaha transmigrasi dan keluarga berencana tetap digalakkan.

Untuk maksud tersebut perlu ditingkatkan administrasi dan inventarisasi data-data penduduk melalui instansi bersangkutan, serta penertiban penduduk yang masuk maupun yang bertempat tinggal di daerah Bali.

8. Pembangunan Desa.

Pelaksanaan program Pembangunan Desa mengharapkan perpaduan antara 2 (dua) komponen utama yaitu : program Pemerintah disatu pihak dan partisipasi masyarakat dilain pihak untuk meningkatkan Desa Swakarya menuju Desa Swasembada, hal-hal pokok yang perlu ditempuh adalah :

- a. Mengintensifkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara berbagai program Pemerintah (sektoral, regional dan lain-lain) yang tertuang di Desa.
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat lewat LSD, dengan lebih intensif dan kontinew antara lain :
 - 1). Pembinaan kesadaran terutama terhadap prinsip gotong royong.
 - 2). Pembinaan Desa Dinas dan Desa Adat sesuai dengan peningkatan pembangunan.
 - 3). Peningkatan Prasarana Desa.
 - 4). Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat Desa.

9. Pemukiman/Perumahan Rakyat.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping penyediaan sandang dan pangan pada tingkat harga yang wajar serta perluasan lapangan kerja maka pembangunan perumahan rakyat merupakan sasaran yang penting. Untuk program perumahan perlu dikembangkan suatu sistem yang lebih terarah dan terpadu yang berkaitan dengan tata guna tanah perkotaan dan pedesaan serta kesehatan lingkungan permukiman. Disamping itu penyuluhan mengenai teknik pembangunan perumahan dan program pemugaran perumahan dan lingkungan desa perlu ditingkatkan agar semakin banyak rakyat mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat pula khususnya pada masyarakat pedesaan.

10. Kesejahteraan Sosial.

Meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk dengan jalan memberikan bantuan sosial, pengadaan sarana dan jaminan tempat penampungan cacat mental dan fisik dan tuna kerja.

11. Pemuda / Olah Raga.

Pembangunan bidang kepemudaan adalah integral dengan pembangunan bangsa pada umumnya. Agar pemuda dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan Nasional yang semakin meningkat, satu dan lain ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Nusa dan Bangsa maka pembinaan generasi muda akan ditingkatkan terus melalui rencana-rencana yang konkrit.

Sasaran-sasaran pokok yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut :

- a. Menyalurkan aktifitas melalui pembinaan mental dan fisik, guna mengurangi kenakalan remaja.
- b. Menyalurkan dan meningkatkan peranan wanita dalam usaha menunjang kesejahteraan sosial.
- c. Usaha-usaha penyaluran dan penanggulangan terhadap anak-anak drop-out dari pendidikan.
- d. Peningkatan prestasi dan sarana olah raga dengan usaha penyediaan fasilitas dan pusat kegiatan olah raga disetiap lingkungan permukiman.

12. Peranan Wanita.

Wanita perlu diberi peranan aktif dalam setiap kesempatan, untuk benar-benar dapat mengembangkan pribadinya sesuai dengan harkat hidupnya sebagai wanita. Untuk mencapai seperti apa yang telah disebutkan diatas, maka wanita perlu diberikan kondisi yang sesuai untuk maksud itu dengan memberikan kesempatan pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan, serta usaha-usaha untuk mengikut sertakan wanita didalam gerak pembangunan.

Didalam peranannya sebagai pelaksana pembangunan maka sasaran yang hendak dituju antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peranan dan tanggung jawab kaum wanita dalam pembangunan dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya melalui wadah organisasi wanita.
- b. Meningkatkan kemampuan organisasi wanita didalam penyediaan dana, prasarana dan sarana, sehingga kegiatan-kegiatannya sebagai pelaksanaan pembangunan yaitu memberikan penyuluhan, pendidikan dan pembinaan dapat berjalan lancar.

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, HUKUM, KAMTIBMAS, PENERANGAN DAN KOMUNIKASI SOSIAL

1. Administrasi Pemerintahan Daerah.

- a. Peranan Kepala Wilayah/Daerah sebagai penguasa tunggal di Daerah sesuai dengan jiwa Undang-Undang No. 5 tahun 1974.
- b. Perlu ditingkatkan koordinasi dan mekanisme kerja antara pimpinan daerah dalam menanggulangi masalah-masalah sosial politik secara tepat dan cepat, untuk itu perlu adanya komunikasi timbal balik.
- c. Perlu adanya peningkatan ketrampilan dan disiplin para aparatur Pemerintahan di Daerah.
- d. Perlu adanya peningkatan prasarana dan sarana kerja dalam menunjang tugas-tugas administrasi pemerintahan.
- e. Adanya sistim Pemerintahan dan mekanisme pemerintahan desa yang mantap.

2. H u k u m .

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Hukum adalah terciptanya kepastian hukum (tertib hukum) dalam masyarakat pada umumnya, dan terciptanya rasa keadilan. Khusus dalam hukum tata pemerintahan, didalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintah Daerah, baik dibidang urusan otonomi (swa tantra) dan tugas-tugas pembantuan, sasarannya adalah : terciptanya tertib hukum dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Dalam mencapai tujuan tersebut hal-hal yang perlu ditempuh antara lain :

- a. Meningkatkan ketrampilan aparat-aparat perencanaan hukum baik dengan jalan penataran maupun dengan penyediaan buku pengetahuan hukum.
- b. Inventarisasi, pengumpulan dan mendokumentir peraturan perundangan yang berlaku baik dibidang dekonsentrasi, urusan otorisasi, tugas pembantuan, maupun peranan nilai-nilai hukum adat, dalam sumbangannya terhadap hukum nasional.
- c. Inventarisasi dan dokumentasi data-data materi hukum.
- d. Menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat lewat penerangan.

3. K a m t i b m a s .

- a. Keamanan, ketertiban dalam masyarakat perlu dipelihara, berlandaskan Ideologi Pancasila dan U.U.D. 45, dalam usaha menciptakan rasa aman dalam menunjang suksesnya pembangunan.
- b. Perlu diciptakan suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.
- c. Partisipasi dan simpati masyarakat hendaknya diwujudkan dalam suksesnya pembangunan.
- d. Perlu diadakan pembinaan bagi warga masyarakat, golongan umat, organisasi-organisasi seperti Propinsi dan fungsionil sesuai dengan fungsinya sehingga tercipta suatu kerukunan sosial yang harmonis.
- e. Dalam keamanan politik, komunikasi politik, baik antar kekuatan sospol sendiri maupun sosial politik dengan aparat Pemerintah perlu ditingkatkan untuk menimbulkan suasana yang mantap.

4. Penerangan dan komunikasi sosial.

- a. Dalam rangka mensukseskan pembangunan di Daerah perlu ditingkatkan kegiatan penerangan dan peranan komunikasi sosial lainnya keseluruh pelosok Daerah seperti peranan radio, televisi dan berita-berita per-surat kabaran dan majalah-majalah.
- b. Pembinaan dan pengembangan pers di Daerah harus didasarkan pada semangat dan jiwa Pancasila.
- c. Melalui penerangan dan komunikasi sosial diharapkan dapat menimbulkan gelora semangat pengabdian, persatuan, tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

F. Strategi Pembiayaan.

Untuk melaksanakan hal-hal yang diuraikan diatas, disamping faktor manusia, maka faktor biaya memegang peranan yang sangat menentukan. Pada prinsipnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah Bali terutama akan diusahakan dari sumber yang berasal dari dalam negeri, baik yang berasal dari sektor Pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat/ sektor swasta. Bantuan dari Luar Negeri juga diharapkan, tetapi sifatnya hanyalah sebagai pelengkap saja.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dari Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar bantuan Pemerintah Pusat terus ditingkatkan sesuai dengan laju pembangunan di Daerah Bali.
2. Meningkatkan pendapatan asli Daerah sendiri dengan jalan :
 - a. Intensifikasi penggalian sumber-sumber yang telah ada.
 - b. Extensifikasi yaitu menggali sumber-sumber baru tanpa menambah beban rakyat banyak.
3. Menciptakan iklim yang sehat untuk kelancaran berusaha dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/ sektor swasta didalam pembangunan Daerah Bali melalui PMDN.

BAB : IV.

P E N U T U P .

A. Pelaksanaan.

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali ditetapkan oleh D.P.R.D. berupa Peraturan Daerah dan Pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah/Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa Peraturan-Peraturan dan atau Garis-Garis Kebijaksanaan.
2. Setiap lima tahun sekali, Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali ini akan diperbaiki atau disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi disegala bidang.
3. Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk A.P.B.D.

B. Persyaratan.

Berhasilnya rencana pembangunan di Daerah Bali tergantung pada kondisi sosial-ekonomi di Daerah Bali serta partisipasi seluruh masyarakat, baik ditingkat Daerah maupun ditingkat Nasional.

Berhasilnya pembangunan Daerah berarti berhasilnya pula pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaan pembangunan harus disertai dengan tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat terutama sekali tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh aparat pelaksana.